

BANKING LAW (ISLAMIC LAW)



LAPORAN PENELITIAN  
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

KK  
KKB  
346 082 2  
Min  
a

**ANALISIS PERTUMBUHAN PRODUK PEMBIAYAAN  
(MURABAHAH DAN MUDHARABAHAH) PADA LEMBAGA  
PERBANKAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA 1998-2003  
(FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI, PELUANG  
DAN KENDALA YANG DIHADAPI)**

Peneliti:

Drs. H. Ec. Karjadi Mintaroem, MS  
Vina Kharisma Dewi, SE.



**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2003  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4623/J03/PG/2003  
Tanggal 13 Juni 2003  
Nomor Urut 12.

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi                  |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	: Analisis Pertumbuhan Produk Pembiayaan (Mura Bahan Dan Mudharabah) Pada Lembaga Perbankan Berbasis Syariah Di Indonesia, 1998-2003 (Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peluang Dan Kendala Yang Di Hadapi)
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Drs. Ec. Karjadi Mintaroem, MS.
b. Jenis kelamin	: Laki-Laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) 130517150
d. Jabatan Sekarang	: Lektor Kepala
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Ekonomi
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Ekonomi Islam/Lembaga Keuangan Islam
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian	:
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 4.000.000,00
8. Hasil Penelitian	( ) Baik Sekali (V) Baik ( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 18 Nopember 2003

Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	ANALISIS PERTUMBUHAN PRODUK PEMBIAYAAN (MURABAHAH DAN MUDHARABAH) PADA LEMBAGA PERBANKAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA, 1998-2003 (FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI, PELUANG DAN KENDALA YANG DI HADAPI)
Tim peneliti	H. Karjadi Mintaroem Vina Kharisma Dewi
Tahun Penelitian	2003
Jumlah halaman	Halaman
Jurusan/ Fakultas	Ekonomi Umum/ Fakultas Ekonomi
Univ/ Inst/ Akademi	Universitas Airlangga
Nomor kontrak	753/ J03.2/ PG/ 2003
Sumber Dana	DIK Rutin Unair, Tahun 2003

---

### **1. Pokok Pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi :**

- a) Bagaimanakah profil pembiayaan murabahah dan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 1998-2003 (I)
- b) Faktor-faktor (eksternal) dalam perekonomian apakah yang signifikan berpengaruh dalam kelancaran mekanisme pembiayaan (Murabahah dan Mudharabah) pada bank syariah.

Bagaimanakah kondisi yang terjadi pada bank Syariah berkaitan dengan ke dua produk pembiayaan ini (mudharabah dan murabahah), hambatan dan prospeknya dimasa yang akan datang. Mengetahui posisi serta kondisi pembiayaan murabahah pada awal pertumbuhannya di Indonesia.

### **2. Sedangkan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:**

1. Mengetahui profil pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Lembaga keuangan (Bank umum dan unit usaha berbasis syariah) di Indonesia.
2. Mengetahui faktor-faktor makro eksternal dalam perekonomian , yang berpengaruh pada pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank syariah

3. Menganalisis faktor-faktor makro eksternal dalam perekonomian yang paling signifikan berpengaruh pada pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umum dan unit usaha berbasis syariah di Indonesia.
4. Mampu memberikan gambaran tentang prospek, peluang, serta kendala pertumbuhan yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia khususnya pembiayaan murabahah dan mudharabah, dimasa awal pertumbuhannya / sebuah studi pendahuluan.

**3. Manfaat yang diharapkan didapat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut**

1. Memperoleh gambaran secara jelas tentang keberadaan, prospek, kendala pembiayaan Murabahah dan Mudharabah
2. Sebagai kajian awal terhadap pertumbuhan Lembaga keuangan (perbankan) berbasis syariah di Indonesia pada awal-awal masa pertumbuhannya di Indonesia dalam rangka penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Memberikan masukan kepada lembaga/ pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia.

Dalam Pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat uji regresi linier berganda yang analisisnya ditunjang dengan mengambil data-data yang bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara pada pihak terkait dalam hal ini adalah bank-bank syariah di Kantor pusat Jakarta. Dalam melakukan wawancara diambil sampel 2 buah bank syariah yang telah menjalankan pembiayaan (murabahah dan mudharabah) selama minimal 2 tahun.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh secara simultan, diketahui bahwa dari kedua model persamaan regresi linier yang diajukan tersebut (murabahah dan mudharabah) variabel-variabel independen berpengaruh signifikan dalam meneangkan variabilitas variabel-variabel terikatnya (pembiayaan murabahah dan mudharabah)

Dari hasil pengujian secara individual, diketahui bahwa pada masing-masing persamaan dari dua persamaan tersebut memiliki perbedaan faktor-faktor yang signifikan serta tidak signifikan mempengaruhi antarlain sebagai berikut :

Persamaan pertama yaitu variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dari keempat variabel yang termasuk didalam model dan diduga berpengaruh yaitu antara lain Dana Pihak ketiga, Tingkat Inflasi, Suku Bunga kredit Investasi Bank Konvensional, Tingkat Keuntungan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, hanya 2 variabel saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Indonesia antara lain Dana Pihak Ketiga bank syariah serta tingkat bunga Kredit Investasi bank Konvensional. Sedangkan Tingkat Inflasi dan Tingkat Keuntungan Sertifikat Wadiah bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Persamaan kedua yaitu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah, dari keempat variabel yang termasuk didalam model antara lain yaitu; Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, tingkat Inflasi dalam perekonomian, Tingkat bunga kredit Modal Kerja Bank Konvensional, serta Tingkat Keuntungan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah adalah seluruh variabel yang termasuk didalam model berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

Dari hasil Observasi dilapangan terhadap responden disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan adalah SDM, Sosialisasi serta sistem perundangan yang belum jelas berpengaruh pada sistem manajemen dan pengelolaan pembiayaan sementara peluang yang belum mampu dikembangkan saat ini terkait dengan sektor Bisnis.

Peluang pengembangan kegiatan penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor usaha lain yang belum terjangkau akan terbentur pada prinsip prudential banking sendiri, Instrumen syariah yang masih terbatas, dan masalah kebijakan serta aturan main yang lebih jelas tertuang dalam undang-undang bank syariah.

Prospek kedepan pembiayaan murabahah dan mudharabah bank syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melepaskan diri dari pengaruh

perubahan tingkat suku bunga bank konvensional, karena pengaruh yang tinggi ini justru membahayakan masa depan bank syariah sendiri. Meningkatkan efisiensi terhadap cost untuk meningkatkan daya saing dengan bank konvensional dalam penentuan nisbah bagi hasil/ keuntungan, meningkatkan sosialisasi kemasyarakatan untuk meraih pasar, adalah beberapa saran tindakan yang harus dilakukan bank syariah.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tugas penulisan laporan ini tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti antara lain kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan bantuan dana dari DIK RUTIN Unair dalam rangka pembiayaan penelitian ini,
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, yang telah memberikan rekomendasi untuk memberikan dana dalam pelaksanaan penelitian ini,
3. Kantor Bank Muamalat dan Bank Negara Indonesia Pusat Jakarta, yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti,
4. Kepala Bank Indonesia Jakarta dan Surabaya, yang telah memberikan bantuan berupa data yang penting untuk penelitian.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada pada peneliti, maka dengan laporan ini diharapkan adanya kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan laporan ini secara lebih baik lagi dari para pembaca.

Surabaya, November 2003

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	6
2.1.1. Tinjauan Kepustakaan .....	6
2.1.2. Model Analisis dan Kerangka Berfikir Penelitian .....	19
2.2. Penelitian Sebelumnya .....	22
2.3. Hipotesa Penelitian .....	23
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
3.1. Tujuan Penelitian .....	24
3.2. Manfaat Penelitian .....	24
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b>	
4.1. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel .....	25
4.2. Lingkup Penelitian .....	25
4.3. Data yang digunakan .....	26
4.4. Prosedur Perolehan Data .....	26
4.5. Pendekatan Penelitian .....	27
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian .....	31
5.1.1. Tinjauan Perkembangan Kondisi Perbankan di Indonesia (Syariah dan Konvensional) .....	31
5.1.2. Pertumbuhan Poduk-Produk Perbankan Syariah .....	33





5.1.2.1. Gambaran Perkembangan Produk-Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah .....	36
5.1.2.2. Gambaran Perkembangan Produk-Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah .....	37
5.1.3. Gambaran Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Yang Dihimpun Bank Konvensional .....	41
5.1.4. Gambaran Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Konsumtif, Investasi Pada Bank Konvensional .....	42
5.1.5. Perkembangan Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia .....	44
5.2. Hasil Penelitian .....	51
5.2.1. Hasil Regresi .....	51
5.2.1.1. Pengujian Terhadap Model Persamaan Regresi .....	56
5.2.2. Observasi Kondisi Internal .....	66
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### TABEL :

Tabel 1.1. Financial Deepening .....	3
Tabel 1.2. Produk-produk Bank Syariah di Indonesia .....	4
Tabel 5.1. Pertumbuhan Aset, DPK, Kelembagaan Bank Syariah .....	33
Tabel 5.2. Dominasi Sistem Jual Beli Pada Bank Syariah Di Beberapa Negara .....	34
Tabel 5.3. Portofolio Aktiva Produktif Bank Syariah Internasional .....	34
Tabel 5.4. Ringkasan Prestasi Bank Syariah Bulan Terpilih .....	38
Tabel 5.5. Posisi DPK Bank Konvensional Tahun Terpilih .....	41
Tabel 5.6. Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi Dan Kredit Modal Kerja (%) Indonesia (1995-2003 II) .....	49
Tabel 5.7. Posisi SWBI Bulan Terpilih Dalam Milyar .....	50
Tabel 5.8. Ringkasan Hasil Perhitungan Statistik .....	51
Tabel 5.9. Ringkasan Koefisien Regresi, T hitung dan Sig T Persamaan Fungsi Pertama Variabel Terikat Murabahah .....	52
Tabel 5.10. Ringkasan Koefisien Regresi, T hitung dan Sig T Persamaan Fungsi Kedua Variabel Terikat Mudharabah .....	54
Tabel 5.11. Klasifikasi Nilai Durbin Watson .....	57
Tabel 5.12. Ringkasan Hasil Perhitungan Statistik Setelah Dilakukan Tindakan Perbaikan (Chocran dan Orcutt) .....	58
Tabel 5.13. Ringkasan Koefisien regresi, T hitung dan Sig T Persamaan Fungsi Kedua Variabel terikat (Murabahah) Setelah Dilakukan Tindakan Perbaikan .....	59
Tabel 5.14. Ringkasan Koefisien regresi, T hitung dan Sig T Persamaan Fungsi Kedua Variabel Terikat (Mudharabah) .....	61
Tabel 5.15. Contoh Kendala Penerapan Produk Syariah Dalam Perbankan .....	82

**GAMBAR :**

Gambar 2a Principatory Mechanism .....	10
Gambar 2b Pembiayaan Murabahah .....	12
Gambar 2c Skema <i>Al Bai 'Naqdan wal Murabahah Muajjal</i> .....	12
Gambar 2d Skema <i>Al Bai 'Naqdan wal Murabahah Muajjal-2</i> .....	13
Gambar 2e Skema Ijarah .....	14
Gambar 2f Skema Ijarah-2 .....	14
Gambar 2g Skema Pembiayaan Musyarakah .....	15
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Penelitian .....	21
Gambar 5.1. Proporsi Penempatan portofolio Pada Bank Syariah Di Indonesia .....	35
Gambar 5.2. Dana Pihak Ketiga Yang Dikelola Bank Syariah .....	37
Gambar 5.3. Ringkasan Pembiayaan Yang Disalurkan Bank Syariah Beberapa Tahun Terpilih .....	38
Gambar 5.4. Perkembangan Beberapa Skim Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia .....	40
Gambar 5.5. Perkembangan Comsumer Price Indeks di Indonesia .....	47
Gambar 5.6. Durbin Watson .....	56

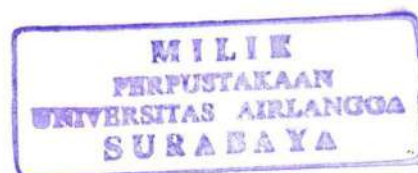
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Konsep perekonomian bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadist pada akhirnya merupakan konsep yang menjadi pilihan sebagian kalangan umat Islam dalam mengelola kegiatan ekonomi menuju pelaksanaan ajaran agama Islam yang *kaffah*, hal ini diyakini akan dengan cepat membawa masyarakat menuju masyarakat dunia yang adil dan makmur menurut ajaran Islam. Sejalan dengan itu pemikir Islam memulai tahapan Islamisasi ekonomi ini dengan memperbaiki salah satu sarananya untuk bermuamalah secara perlahan agar sesuai dengan syariah. Sebagaimana diketahui *riba*, *gharar* dan *maysir* adalah unsur-unsur yang harus dihilangkan untuk mengislamkan proses kegiatan ekonomi ini, sedangkan *riba* telah lama diterapkan oleh umat Islam sendiri dalam menjalankan kegiatan perbankan.

Hal ini menggugah kesadaran sebagian umat Islam untuk memulai meninggalkan sistem konvensional yang selama ini telah dilaksanakan. Dengan didirikannya Bank Mit Ghamr di Mesir pada tahun akhir tahun 1960-an dan disusul dengan Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab pada tahun 1973 dengan modal US\$ 14 juta, yang disusul dengan berdirinya lembaga keuangan multilateral berdasarkan prinsip syariah, Islamic Development (IDB) Bank di Arab Saudi. Pada tahun 1975, Lembaga ini menyerupai Bank Dunia yang dibangun oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuan IDB adalah untuk memupuk perkembangan dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri maupun bersama-sama dengan prinsip syariah (Mannan, 1997 : 191). Berdirinya IDB kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam lain diseluruh dunia, sebagai contoh di timur tengah, bank-bank Islam bermunculan pada dasawarsa 70-an antara lain; Dubai Islamic Bank (1975), Kuwait Finance House (1977) (Raharjo Dawam, 2003: xvii). Serta Islamisasi seluruh sistem perbankan dilakukan secara serentak di Republik rakyat Iran. Didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada awal 1980 merupakan pelopor Bank Islam



di Asia Tenggara yang keberadaannya telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa pesatnya. Tidak kurang lembaga-lembaga perbankan di berbagai belahan dunia juga membuka pelayanan berbasis syariahnya. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting diproyeksikan bahwa total aset perbankan syariah akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh sebesar 356,25 % setiap tahunnya. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan Bank Syariah (Karim, Adiwarman, 2003:27).

Lembaga keuangan berbasis syariah ini juga mendapatkan perhatian yang serius di Indonesia dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Dalam perkembangannya BMI telah terbukti menunjukkan prospek yang cerah mengingat kemampuan Bank Syariah yang masih mampu *survive* dalam masa krisis, dimana banyak bank konvensional yang telah mengalami kolaps, namun Bank berbasis syariah masih dinyatakan sehat dan tidak bermasalah. Setelah pada 1998 BI menegaskan adanya *Dual Banking Sistem* di Indonesia, Menurut catatan BI sampai dengan Akhir Februari 2003 sudah ada 2 bank umum syariah, enam bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS), serta 85 BPRS dengan total keseluruhan kantor lebih dari 130 lebih kantor bank Syariah di Indonesia. Pertumbuhan lembaga perbankan Syariah yang sedemikian pesat ini juga secara tidak langsung mendorong para bankir untuk mengalihkan bisnis perbankan mereka secara syariah yang terbukti lebih tahan terhadap goncangan krisis moneter dan perbankan.

Kondisi perbankan konvensional yang mulai ambruk pada saat krisis telah membawa kelumpuhan pada sektor riil terutama industri yang berskala besar yang menjadi langganan bank di kala itu, sebagaimana Umar Chapra (Chapra, 1997:xxvi) berpendapat bahwa pada masa sekarang bank telah memainkan peran ganda dalam menciptakan akses yang gampang terhadap kredit hal tersebut membuka peluang adanya sindrom yang tidak terbatas pada manusia modern, lebih jauh lagi Umar Chapra juga menjelaskan bahwa hal umum yang dilakukan Bank adalah meminjamkan hanya kepada individu dan perusahaan yang

mempunyai jaminan yang diperlukan dan kaya Pihak bank terbesar keenam di Amerika Serikat, Morgan Guarantee Trust Company, mengakui bahwa sistem perbankan telah gagal mendanai perbankan-perbankan kecil yang matang atau *venture capitalist* dan cenderung membiayai perusahaan besar dan kaya yang lebih dapat membayar uang tunai (Chapra, 1999:352).

Hal ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dimana pembiayaan ini dampaknya secara makro dapat diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam teori makro hal ini dapat dilihat dari financial deepening (rasio kredit terhadap GDP). Bagi perbankan konvensional rasio ini adalah (1997) 71,05 %, (1998) 57,08 %, (1999) 33,07 %. Adiwarmar Karim menganalisa bahwa: *"Labilnya rasio ini juga dapat diartikan bahwa sebagian kredit perbankan konvensional tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan sektor riil yang diukur dengan GDP. Penurunan jumlah kredit yang sangat besar juga ternyata tidak berpengaruh banyak terhadap GDP ini dapat diartikan juga bahwa sejumlah kredit perbankan konvensional digunakan untuk berspekulasi dipasar Uang atau paling tidak dapat dikatakan, tidak digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil"* (Karim, Adiwarmar, 2000:1)

Tabel 1 Berikut ini menunjukkan besarnya Financial Deepening Indonesia:

**Tabel 1.1**  
**Financial Deepening**

Tahun	1997	1998	1999
a. Bank Syariah	0.07%	0.05%	0.06%
b. Bank Konvensional	71.05%	57.80%	33.07%
Total	71.12%	57.85%	33.17%

Sumber : Mulya Siregar, 2000 , Bank Indonesia diolah Kembali.

Sesuai dengan tujuan utamanya, tujuan utama Bank Islam menurut Mettwally (1995, 141) adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi, sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat Islam. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah memiliki beberapa produk sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Produk-produk Bank Syariah di Indonesia.**

<b>Penyaluran Dana</b>	<b>Penghimpunan Dana</b>	<b>Jasa Perbankan</b>
1. Prinsip Jual Beli (Bai') -Pembiayaan murabahah -Salam -Istishna 2. Prinsip Sewa (Ijarah) 3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 4. Akad Pelengkap -Hivalah (Alih hutang piutang) - Rahn (Gadai) - Wakalah (Perwakilan) - Kafalah	1. Prinsip Wadiah 2. Prinsip Mudharabah -Mudharabah Muttlaqah -Mudharabah Muqayyadah ( <i>On Balance Sheet</i> dan <i>Off Balance Sheet</i> ) 3. Akad Pelengkap Wakalah (Perwakilan)	1. Sharf (Jual Beli Valas) 2. Ijarah (Sewa)

Sumber ; Bank Indonesia dan Karim Consulting diolah kembali, 2001

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang sedemikian cepat disumbang oleh pesatnya pertumbuhan produk-produk pembiayaan, dan dari sekian banyak produk pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah diatas pembiayaan yang paling pesat pertumbuhannya adalah produk pembiayaan Murabahah . Hal ini dibuktikan dengan besarnya porsi murabahah terhadap total Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dan dari sebagai contoh sampai akhir 2002 total penyaluran kredit senilai 3,47 Triliyun sekitar 71,85 % disalurkan dalam bentuk murabahah. Sementara, pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki kontribusi 14,45 % dan 11,96 % .

Fenomena ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek telaah secara ilmiah, karena sifat murabahah ini sendiri merupakan pembiayaan konsumtif maupun produktif (modal kerja) sedangkan pembiayaan mudharabah juga merupakan pembiayaan yang bersifat produktif (investasi). Pembiayaan murabahah dan mudharabah apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi makro merupakan sarana penggerak sektor riil, sekaligus merupakan pelaksanaan fungsi intermediasi sektor perbankan yang menyalurkan dana dari sektor surplus kesektor minus. Sebagaimana diketahui selama ini sektor perbankan dianggap telah gagal melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik, terbukti dengan lebih tingginya kinerja penyaluran kredit bank syariah jika dibandingkan dengan

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari Rasio penyaluran kredit bank syariah terhadap pihak ketiga (*Finance to Deposit Ratio/ FDR*) bank syariah yang sebesar 117 % dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya mencapai 49,33 %.

Terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS), walaupun jika ditinjau sumbangannya terhadap perekonomian secara makro kontribusinya amatlah kecil terhadap total keseluruhan kredit perbankan secara keseluruhan, dan produk-produk ini diharapkan dapat menjangkau pasar sektor riil.

Mengingat besarnya rasio tersebut menjadikan alasan bagi peneliti untuk menemukan serta menganalisa variabel-variabel ekonomi apa saja yang berpengaruh terhadap pesatnya pertumbuhan pembiayaan murabahah dan murabahah.

## **2. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil pembiayaan murabahah dan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 1998-2003 (I)
2. Faktor-faktor (eksternal) dalam perekonomian apakah yang signifikan berpengaruh dalam kelancaran mekanisme pembiayaan (Murabahah dan Mudharabah) pada bank syariah.
3. Bagaimanakah kondisi yang terjadi pada bank Syariah terutama yang berkaitan dengan produk Pembiayaan ini, hambatan dan prospeknya dimasa yang akan datang. Mengetahui posisi serta kondisi pembiayaan murabahah pada awal pertumbuhannya di Indonesia



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Tinjauan Kepustakaan**

Dengan menggunakan penelaahan teori yang digunakan dalam perbankan Konvensional, Didalam penelitian ini tidak dibahas variabel-variabel non ekonomi seperti preferensi masyarakat, kepuasan yang dirasakan nasabah dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang mengacu pada kesengan atau kegunaan subyektif yang dirasakan oleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa (Samuelson dan Nordaus; 1999)

#### **1. Pengertian Bank Islam**

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Sumitro, 2002:5). Berdasarkan rumusan tersebut Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam , yakni mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis (A. Wahab Khallaf, dalam Sumitro, 2002:5). Sedangkan Bank Syariah atau Bank Islam menurut Syafii Antonio dan K. Perwataadmadja (1992; 2) adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam , yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis yaitu menjauhi praktek-praktek yng mengandung unsur Riba dan mengikuti praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya dan tidak dilarang oleh beliau.

Definisi lain menyebutkan bahwa bank adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan pada yang memerlukan dana

baik untuk perorangan atau untuk badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain sesuai syariat Islam tanpa sistem bunga (Adhim, 1998: 30).

Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar jual beli dan bagi hasil (Y.Sri Susilo dkk, 1999:110).

## 2. Ciri dan Keistimewaan

Perbedaan utama antara kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana (Y.Sri Susilo dkk, 1999:110). Ciri-ciri yang membedakan operasional Bank Syariah dengan konvensional antara lain :

- a. Beban biaya disepakati diawal Akad yang besarnya dalam bentuk nominal yang tidak kaku. Beban biaya dikenakan hanya sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan keuntungan secara pasti (*fixed return*) yang ditetapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek adalah Allah SWT semata.
- c. Menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dan mata uang dari mata uang yang sama dan mata uang yang tidak sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditas) yang dapat diperjual belikan. Oleh karena itu pada umumnya bank Islam tidak memberika pembiayaan dalam bentuk tunai tetapi pengadaan barang.
- d. Adanya pos pendapatan yang berupa "Rekening Pendapatan non Halal" sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- e. Adanya dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank syariah tersebut agar tetap sesuai dan tidak melanggar syariah Islam.



- f. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah bahasa arab seperti; *Ijarah, ba'I batsaman Ajil, mudharabah, murabahah* dan sebutan-sebutan lainnya.
- g. Adanya fasilitas kredit khusus tanpa bunga yang bersifat sosial dan membantu umat yang tidak mampu, yang dananya diambilkan dari dana Infak, dan shodaqh yang dikelola oleh sebagian bank Islam.
- h. Terdapat bermacam ragam skema pembiayaan maupun pemupukan dana masyarakat pada bank Syariah dibandingkan pada bank konvensional.

### 3. Prinsip dasar berusaha berdasarkan Syariah Islam

Dalam menjalankan usahanya bank Syariah bekerja dengan melaksanakan Syariah Islam, antara lain :

#### I. Prinsip Halal

Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang baik (*toyyib*), karena Allah SWT, tidak hanya memerintahkan pada manusia muslim saja tetapi pada seluruh manusia agar didalam berusaha hendaklah hanya mengambil yang baik saja (QS. Al- Baqarah, ayat:168). Baik disini diartikan baik dalam bentuk zatnya baik buruknya zat itu, halal tidaknya zat itu, caranya memperoleh, dan cara pemanfaatan atau penggunaannya.

#### II. Prinsip Saling Ridho

Dalam berniaga bank Syariah juga menerapkan prinsip saling ridho yang sebagaimana Allah SWT, telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar dalam berniaga dan dalam memperoleh untung dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan yang baik yang berlaku secara ridho sama ridho, yang dimaksudkan ridho sama ridho disini tidak saja suka sama suka dan bersifat *win-win solution*.

#### III. Prinsip menghindari Riba

Riba dalam Islam jelas sudah disebutkan secara nyata dilarang dalam Al-Quran, hal ini terdapat pada ; QS ArRum: 39, An-Nisaa 160-161, Al-Baqarah 278-279, Ali-Imran 130. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES, 2003: 29) Menggolongkan Riba menjadi 2 jenis Riba antara lain:

- a. Riba Fadl, riba yang terjadi karena pertukaran barang yang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang.
- b. Riba Nasiyah, riba yang terjadi karena pertukaran barang yang sejenis tetapi jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu.

#### IV. Prinsip Berlaku Adil

Dalam melakukan pemiagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tidak pandang bulu termasuk kepada pihak yang tidak disukai karena orang yang adil akan lebih dekat dengan taqwa (MES, 2003: 30). Hal ini merupakan firman Allah SWT, yang terdapat dalam; QS. Al-Maidah; 8, An-Nahl; 90, Al-An'am; 152, dan Surat Ar-Rahman; 7-9.

Dengan berlaku adil akan membuat orang lain tidak merasa tertipu dan Islam bahkan melarang manusia untuk "sekedar" membawa kepada suatu kondisi yang dapat menimbulkan keraguan dan dapat menyesatkan atau *gharar*. Kondisi ini dapat terjadi apabila ada gangguan pada mekanisme pasar atau karena informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*tadlis*) (MES, 2002: 32), dan dalam menjalankan usahanya Islam mengajarkan agar menepati semua perikatan yang telah disepakati dan apabila. Perubahan kondisi yang disepakati harus dilakukan berdasarkan ridho sama ridho dan tidak ada paksaan oleh satu pihak pada pihak yang lain dalam hal ini dan keduanya sama-sama diuntungkan dan tidak sebaliknya.

#### V. Mengelola Resiko

Dalam mengelola sumber-sumber alam yang dititipkan oleh Allah SWT kepadanya, manusia dilarang untuk mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang wajar dalam menanggung resiko, walaupun resiko tersebut mempunyai kemungkinan untuk membawa manfaat namun apabila kemungkinan kerugian tersebut lebih besar dari kemungkinan mendapat keuntungan maka hal ini sama dengan mengeluarkan sesuatu yang melebihi kemampuan dan seharusnya usaha tersebut dihindari (QS Al-Baqarah :219).

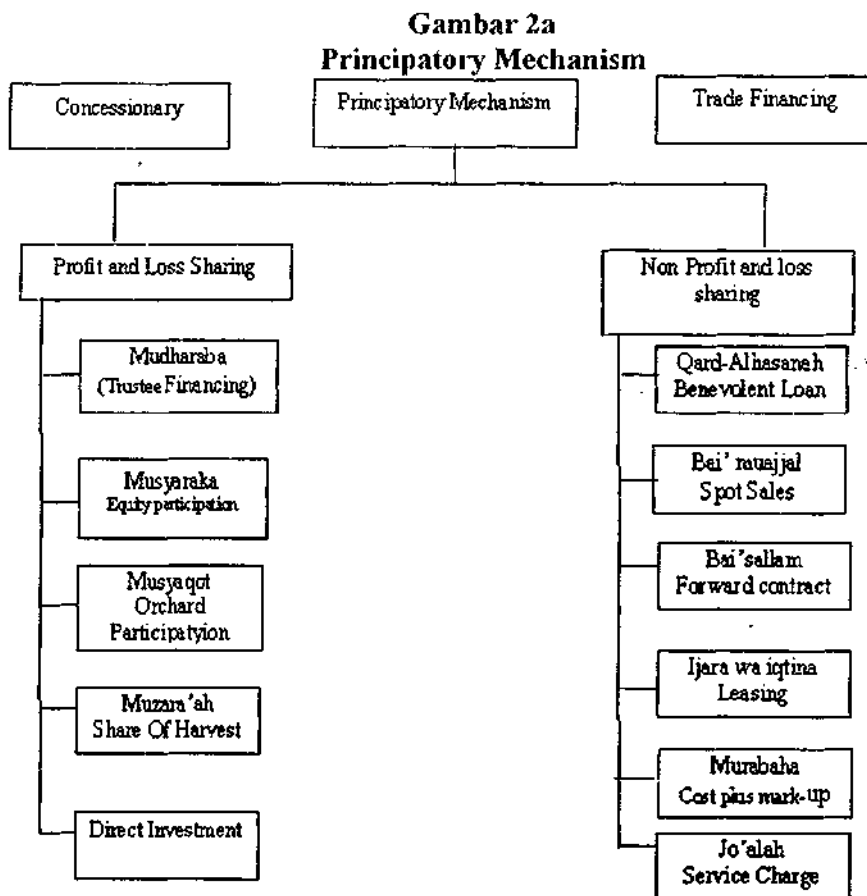
#### 4. Prinsip Aqad Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi Syariah harus memenuhi rukun syarat tertentu, rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan (MES, 2003:38). Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah :

- Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi misalnya; penjual dan pembeli, penyewa dan yang memberi sewa, pemberi jasa dan yang memberikan jasa.
- Adanya barang (*maal*) atau jasa (*amal*) yang menjadi obyek transaksi.
- Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijab*) bersama dengan kesepakatan menerima (*kabul*).

#### 5. Prinsip-prinsip dan Akad-akad dalam Operasional Bank Syariah

Khazan 1993; Mirakhor 1987 yang dikutip dalam sebuah jurnal yang berjudul "An Application Of Islamic Banking Principles to Microfinance" terbitan oleh UNDP, pernah membagi serta mempertegas Tipe-tipe kontrak dalam perbankan Islam yaitu sebagai berikut ini:



### A. Prinsip Jual beli

Pembiayaan Murabahah menurut Adiwarmam Karim (2003; 84) berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank yang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin). Kedua belah piha harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan didalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah

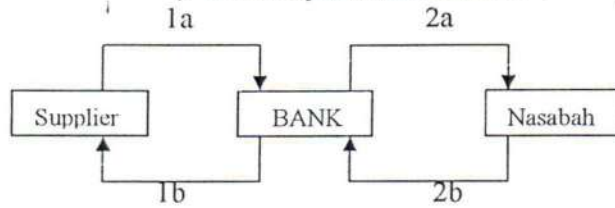
selama berlakunya akad. Dan dalam perbankan Murabahah selalu dilakukan dengan cicilan (*Bitsaman Ajil* atau *Muajjal*). Transaksi ini lazim dilakukan pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya misalnya 10 % atau 20 % (*Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; II, hal 293*)

Pada prinsipnya akad jual beli (*Bai'*) dalam hukum Islam ada 4 bentuk akad yaitu:

1. *Al-Bai' Naqdan*; Jual beli secara tunai, barang maupun uang diserahkan bersamaan yaitu diawal transaksi.
2. *Al-Bai' Muajjal*; Barang diserahkan diawal periode dan uang diserahkan selanjutnya secara cicilan selama beberapa periode atau sekaligus (lump sum diakhir periode).
3. *Salam*; Berkebalikan dengan muajjal uang diserahkan terlebih dahulu sekaligus dimuka dan barangnya diserahkan diakhir periode.
4. *Istishna*; sebenarnya adalah akad salam yang pembayarannya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan (jadi tidak dilakukan secara lump-sum diawal)

Skema Pembiayaan Murahabah dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini.

**Gambar 2b**  
**Pembiayaan Murabahah :**



Keterangan :

1a Supplier menjual secara tunai

2a Bank menjual secara cicilan

1b Bank membeli secara tunai

2b Nasabah membeli secara cicilan

Rp. X,- di tambah keuntungan bank

(Karim, Adiwarman, 2003)

Ada dua macam pola arus kas murabahah antaralain :

1. *Al- Bai' Naqdan* (Pembelian tunai) *wal Murabahah Muajjal* (bayar dengan cicilan) Skema :

**Gambar 2c**

Barang diterima oleh Bank

Rp

(Bank sebagai Pembeli)

Cash Out

bai'naqdan



Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

(Barang diserahkan

(Bank sebagai Penjual)

Oleh Bank)

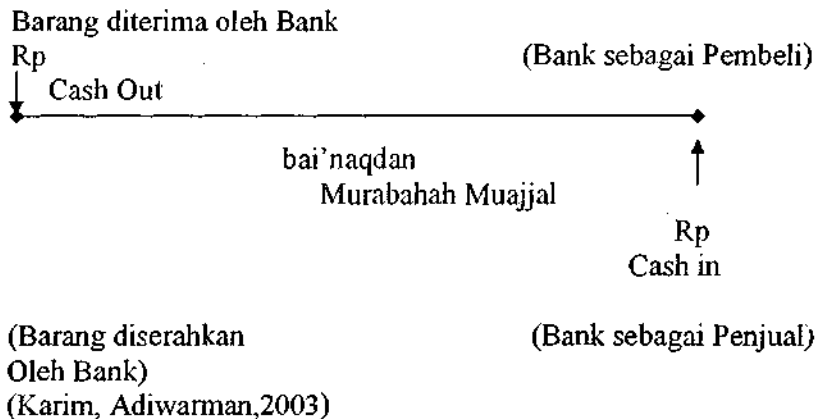
Cash in

(Karim, Adiwarman, 2003)



2. Al-Bai' Naqdan wal Murabahah Muajjal (bayar lump sum diakhir)

Gambar 2d



Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah :

1. Mempercepat pembayaran cicilan
2. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo

Berdasarkan sumber dana yang digunakan pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok :

1. Pembiayaan *Murabahah* yang didanai dengan investasi yang tidak terikat (*Unrestricted Investment Account*).
2. Pembiayaan *Murabahah* yang didanai dengan investasi yang terikat (*Restricted Investment Account*).
3. Pembiayaan *Murabahah* dengan modal Bank.

Dalam setiap pendisainan sebuah pembiayaan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Kebutuhan nasabah.
- b. Kemampuan finansial nasabah.

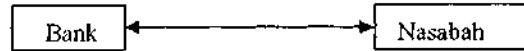
**C. Prinsip sewa (Ijarah)**

Dalam transaksinya dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli , namun perbedaannya



terletak pada obyek transaksinya bila jual beli obyeknya adalah barang sedangkan Ijarah adalah jasa. Berikut ini adalah skema Ijarah :

**Gambar 2e**  
**Skema Ijarah**

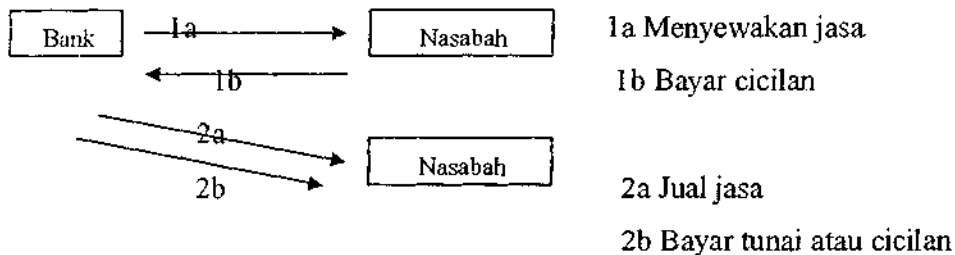


a Bank menyewakan jasa pada nasabah

b Nasabah membayar secara cicilan pada Bank

Pada akhir masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan pindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati diawal perjanjian.

**Gambar 2f**  
**Skema Ijarah**

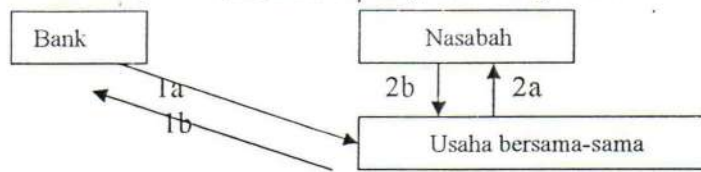


## B. Prinsip bagi hasil (SYIRKAH)

### Musyarakah

Musyarakah (serikat atau kongsi); dilandasi adanya keinginan dari pihak yang berkongsi untuk meningkatkan nilai aset yang dimilikinya secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan syirkah adalah semua bentuk kerjasama yang melibatkan 2 pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama menyatukan sumber daya baik yang berwujud atau tidak berwujud dan ketentuan selanjutnya akan diatur dengan skema sebagai berikut, sehingga ada campur tangan langsung sesuai kesepakatan antara pengelola dan pemilik modal :

**Gambar 2g**  
**Skema Pembiayaan Musyarakah**



1a Dana Musyarakah

1b Bagi hasil usaha

2a Bagi hasil usaha

2b Dana Musyarakah

### **Mudharabah**

#### **a. Mudharabah Mutlaqqah**

Adalah bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shohibul maal dan keahlian dari mudharib dan tidak mensyaratkan adanya wakil dari shohibul maal dalam manajemen proyek sehingga sebagai orang kepercayaan bank harus bertindak dengan hati-hati dan bertanggungjawab karena segala kerugian akan menjadi tanggung jawab (mudharib) selaku orang kepercayaan shohibul maal.

#### **b. Mudharabah Muqayyadah**

Pada dasarnya sama dengan ketentuan mudharabah mutlaqqah namun perbedaannya terletak pada adanya persyaratan pembatasan modal sesuai kepentingan pemilik modal

### **Tinjauan secara teoritis variabel-variabel yang berpengaruh pada perkembangan penyaluran pembiayaan**

Berikut ini akan ditinjau secara teoritis variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap Perkembangan penyaluran pembiayaan terhadap nasabah pada Perbankan Syariah di Indonesia.



Didalam penyaluran dananya pada nasabah, Kondisi makroekonomi, kondisi serta bank konvensional sebagai pesaing haruslah mendapatkan perhatian yang besar karena bank syariah yang memiliki ciri khusus dan menjangkau kalangan tertentu dan karena Fungsi bank syariah itu sendiri sebagai salah satu bentuk lembaga intermediasi dalam perekonomian.

Karena dalam prakteknya melakukan pembiayaan pada nasabah baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif, maka tindakan pembiayaan produktif merupakan tindakan investasi. Investasi akan dianggap menguntungkan apabila *return* yang diperoleh lebih besar daripada suku bunga yang harus dibayarkan atas dana yang dipinjam untuk investasi. Dengan demikian tingkat investasi dapat dianggap sebagai fungsi menurun dari tingkat bunga. Jadi naiknya tingkat bunga akan mengurangi investasi dan sebaliknya (F. Demberg, 1994 : 144), karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya perekonomian makro masih didominasi oleh sistem bunga dan prinsip bagi hasil masih kecil peranannya dalam perekonomian nasional. Investasi dalam perekonomian makro oleh Mankiw (2001) dikelompokkan menjadi tiga sub kelompok antara lain; (1) Investasi tetap untuk bisnis, adalah investasi pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. (2) Investasi residensi adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah dan (3) Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (jika investasi gagal, investasi persediaan negatif)

Bank syari'ah sangat mengharamkan adanya riba atau bunga dalam prakteknya, dengan menghiraukan faktor terhadap agama, selera masyarakat maka Tingkat bunga kredit Bank Umum sangat berpengaruh terhadap produk murabahah ini karena merupakan bank pesaing sehingga tinggi rendahnya tingkat bunga kredit di Bank Konvensional sangat mempengaruhi keputusan calon nasabah, dengan asumsi motif yang digunakan calon nasabah adalah murni berupa motif ekonomi. Dan dalam hal ini return yang diharapkan berasal bukan dari bunga atau *interest rate*, melainkan berasal dari tambahan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah, pada saat melakukan akad dalam transaksi jual beli *murabahah*, serta nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh bank pada saat melakukan transaksi *mudharabah*.

Dawam Raharjo (1996; 614) menyatakan bahwa masalah akan dihadapi perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaannya apabila ongkos kredit nyata yang dipikul debitur ternyata lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. Karena apabila demikian, maka masyarakat akan lari ke bank konvensional yang lebih murah bahkan mungkin akan menuduh bahwa tingkat eksploitasi bank Syariah lebih tinggi dari bank konvensional.

Instrumen pasar uang syariah yang masih terbatas, menyebabkan bank syariah berani menyalurkan dana langsung kemasyarakat (M. Sumartomdjono dkk; 2003). Karena tingginya FDR (*Finance to deposit ratio*) yang bahkan mencapai 117 % dari dana DPK yang berhasil dihimpun pada triwulan I/ 2003, maka modal bank syariah pun ikut berputar, sehingga kelangsungan pembiayaan bank syariah di Indonesia akan sangat bergantung pada pertumbuhan DPK-nya. Sejalan dengan Mishkin yang berpendapat (Mishkin, Frederich; 1998; 262) bahwa ;*"Banks makes profits trough proces of asset transformation: They borrow short (accept deposit) and lend long ( make loans). When a bank takes in additional deposits, it gain equal amount of reserve ; when it pays out deposits, it losses an equal amount of reserves"*.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah salah satu instrumen yang merupakan alternatif pilihan bagi bank syariah untuk menempatkan cadangannya pada bank sentral, sebagaimana bank konvensional yang menempatkan cadangannya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dengan harapan bank memperoleh penghasilan tambahan dari instrumen tersebut. Dalam hal ini SWBI merupakan salah satu alternatif bagi bank syariah untuk menanamkan portofolionya selain pada pembiayaan, maka dalam hal ini SWBI dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan mudharabah ini.

Faktor lain yang tidak dapat diabaikan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya pada nasabahnya antara lain adalah pengaruh inflasi, Karena dalam prakteknya dalam pengaruh inflasi sangat besar dalam menentukan besarnya sebuah nilai dalam perekonomian, terjadinya inflasi dapat menimbulkan terjadinya biaya-biaya tambahan dalam suatu proses produksi antara lain: (1)

Biaya kulit sepatu (*shoelater cost*), yaitu tingkat inflasi yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat bunga nominal menjadi lebih tinggi, dan sebaliknya tingkat keseimbangan uang riil rendah, (2) Biaya menu (*menu cost*), semakin sering terjadi perubahan harga akan mendorong perusahaan untuk semakin sering merubah harga, yang terkadang sering menimbulkan timbulnya biaya yang lebih besar karena harus mencetak ulang katalog, mendistribusikan dsb, (3) Biaya yang terjadi akibat perusahaan yang sering menghadapi biaya menu merubah harga ;karena itu semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin besar variabilitas dalam harga-harga relative terhadap seluruh tingkat harga yang konstan sepanjang tahun tersebut,(4) Biaya inflasi dapat dapat berasal dari undang-undang pajak. Banyak perhitungan tariff pajak tidak menghitung efek inflasi bias mengubah kewajiban pajak individu, seringkali dengan cara yang tidak ingin dilakukan oleh para pembuat undang-undang pajak. (5) Biaya akibat ketidak nyamanan hidup yang ditimbulkan akibat terjadinya inflasi, uang sebagai alat ukur dalam transaksi ekonomi dan ketika terjadi inflasi alat ukur itu telah berubah panjangnya sehingga seringkali hal ini dapat mengacaukan rencana anggaran belanja baik rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Karena dalam pelaksanaannya bank harus melakukan pembelian terlebih dahulu (*Bai' naqdan*) terhadap barang yang akan dibeli nasabah atau menghitung terlebih dahulu prospek usaha yang akan didanai oleh mudharabah atau syirkah dan sebagainya maka inflasi akan berpengaruh dalam pelaksanaan transaksi murabahah ini sebagai berikut :

1. Secara langsung pada harga barang yang menjadi obyek transaksi.
2. Kemampuan nasabah dan bank dikemudian hari apabila terjadi inflasi yang mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan muajjal (cicilan).
3. Tingkat keuntungan bank .
4. Kondisi Proyek dan sebagainya

Penyaluran menurut Reed (*Commercial Banking 1989, 10*) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran dana adalah :

1. Posisi permodalan bank
2. Resiko dan profitabilitas dari berbagai tipe penjamannya
3. Stabilitas dana pihak ketiga

4. Kondisi perekonomian
5. Pengaruh kebijakan iccal dan moneter pemerintah
6. Kemampuan dan pengalaman personel bank
7. Kebutuhan kredit daerah yang dilayani

Sedangkan Dahlan Siamat dalam bukunya manajemen Bank umum (1993, membagi menjadi 2 faktor-faktor yang membatasi ekspansi kredit kedalam 2 kelompok factor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang dimaksud adalah kemampuan pemodal dan tenaga berpengalaman sedangkan factor eksternalnya adalah : kebijakan seperti cadangan atau likuiditas wajib minimum, operasi pasar terbuka (*tight money policy*), penetapan pagu kredit perbankan dan tingkat harga diskonto, terakhir adalah situasi perekonomian secara umum sebab dalam situasi siklus ekonomi atau *business cycle* mengalami kelesuan, daya serap pasar relatif terbatas sehingga sulit bagi bank melakukan ekspansi kredit.

#### 2.1.2 Model Analisis dan kerangka berfikir penelitian

Model yang akan dianalisis dalam penelitian ini akan mengadopsi model persamaan fungsi temuan Haron dan Norafifah Ahmad studi pada tahun 1984 s/d 1998 terhadap bank syariah di Malaysia yang meneliti pengaruh tingkat bunga bank konvensional, Tingkat keuntungan pada Bank Syariah dengan jumlah dana deposito yang ditempatkan pada Bank Syariah di Malaysia. Dalam penelitian tersebut menggunakan alat analisis regresi linier dengan model persamaan fungsi yang telah dirubah menjadi persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$IsD_t = a + bIsDp^*t + u_t \dots \dots \dots (1)$$

$$IsD_t = a + bIsDp^*t + d FDr_t + u_t \dots \dots \dots (2)$$

$$IsSD_t = f + g IsSDp^*t + u_t \dots \dots \dots (3)$$

$$IsSD_t = f + g IsSDp^*t + h SDr_t + u_t \dots \dots \dots (4)$$

Dimana  $IsD_t$  adalah *investment deposit* periode  $t$ ,  $IsDp^*t$  adalah tingkat keuntungan yang diharapkan pada *investment deposit* di bank Syariah,  $FDr_t$  adalah tingkat bunga untuk *investment deposit* pada bank konvensional,  $IsSD_t$  adalah jumlah *saving deposit* pada bank Syariah,  $IsSDp^*t$  adalah tingkat

keuntungan yang diharapkan dari *saving deposit* pada bank Syariah, dan  $SDr_t$  adalah tingkat bunga dari *saving deposit* pada bank konvensional.

Dengan demikian model persamaan fungsi regresi linier yang akan digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$MdF = f(MdFp, InvCr, Infl, Dpk, Swbi)$$

$$MbF = f(MbFp, WkCr, Inf, Dpk, Swbi)$$

Dimana  $MdF$  adalah *Mudharabah Financing* (Jumlah Pembiayaan Mudharabah),  $MdFp$  adalah *Mudharabah Financing Profit* (tingkat keuntungan yang diharapkan),  $InvCr$  adalah *Investment Credit of Conventional Bank Rate* (Kredit konsumsi),  $Infl$  adalah tingkat inflasi, dan  $Dpk$  adalah dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank Syariah.  $MbF$  *Murabahah Financing* (Jumlah Pembiayaan Murabahah),  $MbFp$  adalah jumlah *Murabahah Financing Profit* (tingkat keuntungan yang diharapkan).  $MkKr$ , *Working Capital Kredit Interest of conventional bank* (Kredit Modal Kerja Bank Konvensional).

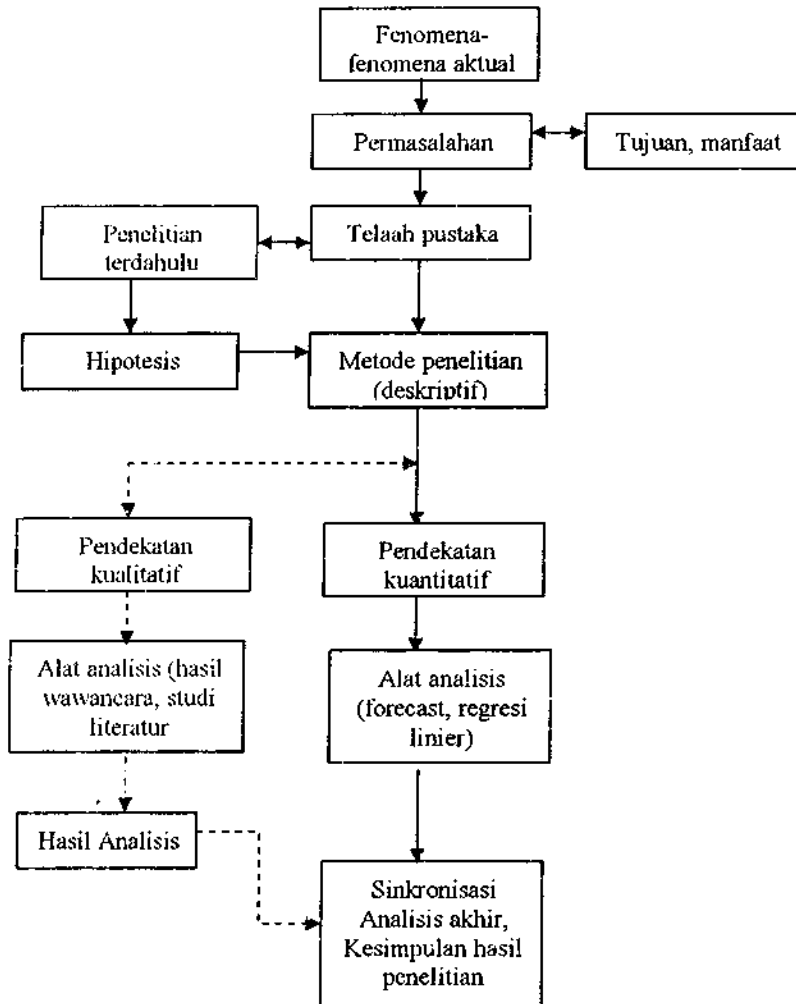
Persamaan fungsi tersebut dirubah menjadi persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$MdF = a + b MdFp + c InvCr + d Inf + e Dpk + Swbi + u$$

$$MbF = f + g MbKr + h WkCr + i inf + j Dpk + Swbi + u$$

## B. Kerangka berfikir penelitian.

Gambar 2.1  
Kerangka berfikir Penelitian





## 2.2 PENELITIAN SEBELUMNYA

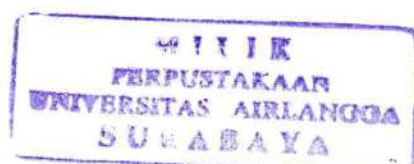
Penelitian sebelumnya:

1. Haroon dan Norafifah (1999), dengan periode penelitian 1984-1998 menemukan adanya hubungan antara jumlah dana yang ditempatkan di bank Islam Malaysia dengan tingkat nisbah keuntungan yang diberikan terhadap deposito tersebut, hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa nasabah yang menempatkan dana mereka pada bank syariah baik berupa tabungan ataupun deposito terdorong karena adanya profit motif. Dalam penelitian ini juga diungkap keberadaan Teori Utilitas Maximum pada nasabah muslim ditunjukkan oleh terdapatnya hubungan negatif antara tingkat bunga bank konvensional dan jumlah deposito yang terdapat pada Bank Syariah. Temuan yang serupa juga terdapat pada studi yang sama di negara-negara; Sudan, Singapura, Jordan dan Malaysia.
2. Gerrand dan Cunningham (1997) melalui studi empirisnya di Malaysia menunjukkan bahwa sikap muslim dan non muslim dalam memilih bank syariah secara signifikan tidak berbeda dimana mereka memilih bank Syariah karena pelayanan cepat dan efisien, kerahasiaan bank, reputasi dan imej bank ringannya pembiayaan cek.
3. Haron dan Shanmugam (1995) Dalam penelitian ini berusaha mencari hubungan antara tingkat keuntungan (nisbah bagi hasil) dengan deposito pada Bank berbasis Syariah. Dengan menggunakan alat uji "*Pearson Correlation*" dan "*First Order Autoregressive model*", ditemukan hubungan negatif yang kuat antara 2 variabel tersebut. Dengan kata lain, temuan mereka mengindikasikan bahwa terdapat hubungan linier yang positif antara deposito pada bank konvensional dengan deposito pada bank Syariah. Studi ini mengadopsi "*The Adaptive Expectation Model*" untuk mengukur efek tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah pada tingkat deposito yang ditempatkan pada bank syariah oleh nasabah.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan diatas maka diajukan hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel-variabel bebas yang diajukan dalam kedua model persamaan tersebut berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel terikatnya.
2. Diduga variable SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah, karena pesatnya pertumbuhan pembiayaan *idle fund* diperkirakan sangat kecil, menyebabkan SWBI tidak lagi menarik untuk dipilih sebagai alternatif bank dalam menempatkan dananya.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan penelitian**

1. Mengetahui profil pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Lembaga keuangan (Bank umum dan unit usaha berbasis syariah) di Indonesia.
2. Mengetahui faktor-faktor makro eksternal dalam perekonomian, yang berpengaruh pada pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank syariah
3. Menganalisis faktor-faktor makro eksternal dalam perekonomian yang paling signifikan berpengaruh pada pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Umum dan unit Usaha berbasis syariah di Indonesia.
4. Mampu memberikan gambaran tentang prospek, peluang, serta kendala pertumbuhan yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia khususnya pembiayaan murabahah dan mudharabah , dimasa awal pertumbuhannya sebagai sebuah studi pendahuluan.

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

1. Memperoleh gambaran secara jelas tentang keberadaan, prospek, kendala pembiayaan Murabahah dan Mudharabah
2. Sebagai kajian awal terhadap pertumbuhan Lembaga keuangan (perbankan) berbasis syariah di Indonesia pada awal-awal masa pertumbuhannya di Indonesia dalam rangka penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Memberikan masukan kepada lembaga/ pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia.

## BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

### 4.1 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

1. Variabel dependen, atau variabel terikat yaitu variabel yang perubahannya tergantung atau ditentukan oleh perubahan pada variabel bebasnya dalam hal ini yaitu Pembiayaan Mudharabah **MdF** *Mudharabah Financing* (Jumlah Pembiayaan Mudharabah), dan Murabahah **MbF** *Murabahah Financing* (Jumlah Pembiayaan Murabahah),
2. Variabel independen , yaitu variabel yang bebas / tidak tergantung, yang dalam hal ini antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. *MdFp, Mudharabah Financing Profit of Syariah bank* (tingkat keuntungan yang diharapkan bank Syariah)
  - b. *WkCr, Working Capital Credit Interest of conventional bank* (Kredit Modal Kerja Bank Konvensional)
  - c. *Infl*, tingkat inflasi pada perekonomian
  - d. *Dpk*, Dana Pihak ketiga yang dikelola perbankan Syariah di Inadonesia.
  - e. *MbFp, Murabahah Financing Profit* (tingkat keuntungan yang diharapkan Bank Syariah)
  - g. *Invcr, (Consumption credit conventional interest rate)*
  - h. *Swbi*, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

### 4.2 Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini secara terbatas mencakup industri perbankan berbasis syariah di Indonesia sedangkan yang termasuk didalam lingkup penelitian ini adalah , Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa batasan yaitu dengan membatasi pembahasan penelitian berkisar pada permasalahan berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan produk pembiayaan Mudharabah dan Murabahah itu sendiri ditinjau dari Perbankan Syariah sebagai

penyedia jasa keuangan bagi nasabahnya serta instrumen-instrumen kebijakan pemerintah yang mengatur, serta kondisi perekonomian secara makro yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan mudharabah dan murabahah ini.

#### **4.3 Data yang digunakan**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat, data primer maupun data sekunder. Data Primer adalah yang di peroleh secara langsung dari obyek yang diobservasi dapat berupa, hasil pengamatan, hasil wawancara, rekaman dan sebagainya, data hasil pengukuran yang dapat langsung dianalisis tanpa harus diolah terlebih dahulu. Data Sekunder adalah data yang harus mengalami pengolahan terlebih dahulu sebelum dianalisis, biasanya data ini adalah data yang di publikasikan oleh lembaga terkait/ resmi (contoh : pemerintah, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik dan sebagainya).

#### **4.4 Prosedur Perolehan Data**

Untuk memperoleh data primer dalam mendukung analisis penelitian secara kuantitatif adalah dengan menggunakan tehnik studi kasus dan menggunakan wawancara sebagai alat tehnik. Wawancara dengan beberapa item pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dalam wawancara ini sample akan ditentukan secara *Purposive Sampling*, pada lembaga keuangan perbankan yang berbasis syariah di Indonesia, sampel dikategorikan berdasarkan Lembaga perbankan dalam hal ini Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syaiah pada bank konvensional yang telah mengoperasikan sistem mudharabah dan murabahah ini minimal 2 tahun dalam hal ini adalah ; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank IFI . Dengan lokasi pengambilan sampel adalah pada kantor-kantor pusat bank syariah sampel di Jakarta sebagai pengawas dan pengendali perusahaannya.dengan model panduan wawancara bersifat wawancara terbuka yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengembangan jawaban dalam sebuah studi kasus.

Sedangkan data sekunder dalam rangka pendekatan secara kuantitatif dalam penelitian ini akan digunakan data statistik perkembangan bank syariah dari Bank Indonesia Pusat.

#### 4.5 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kuantitatif dengan data kualitatif sebagai pendukung analisis penelitian.

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan tingkatan suatu ciri tertentu, untuk menemukan sesuatu pengamat harus mengetahui dahulu apa yang menjadi ciri sesuatu itu atau dengan kata lain penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas.

Sedangkan penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Dapat juga diartikan sebagai inkuiri naturalistik yang mewajibkan peneliti agar lebih dahulu membentuk konsepsi atau teori-teori tertentu mengenai lapangan perhatiannya. (Moleong Ixey, 2002: 3)

Kedua pendekatan tersebut memang tidak pernah dapat disatukan dalam suatu alur berfikir dalam sebuah penelitian namun keduanya bisa saja saling melengkapi asalkan saja terdapat salah satu diantara dua paradigma tersebut yang lebih menonjol.

##### A. Alat analisis Data Sekunder

Dengan Regresi linier berganda dan menggunakan program SPSS versi 10.0. Data akan diestimasi dengan metode rata-rata kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*), yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung.

Persamaan regresi pada model analisis merupakan persamaan regresi linear berganda, karena variabel terikatnya dipengaruhi oleh lebih dari satu

variabel bebas yang selanjutnya akan diestimasi dengan menggunakan metode rata-rata kuadrat terkecil (OLS). Untuk keperluan interpretasi ekonomi dari model regresi yang telah ditaksir akan dilakukan uji hipotesa dengan membandingkan nilai-nilai statistik uji t, F, R, dan  $R^2$ .

B. Analisa Statistik, yaitu dengan menggunakan :

**- Uji t**

Pengujian ini merupakan suatu uji hipotesis terhadap koefisien regresi parsial yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu atau parsial terhadap perubahan variabel terikatnya.

Kriteria yang digunakan dalam uji t ini adalah :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Apabila nilai t observasi (t hitung) lebih besar daripada t tabel ( $t_0 > t(\alpha/2; d\beta)$ ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak atau hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hal ini berarti variabel yang bersangkutan mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel tergantung dan secara statistik pengaruh tersebut signifikan. Sebaliknya, apabila nilai t observasi (t hitung) lebih kecil daripada t tabel ( $t_0 < t(\alpha/2; d\beta)$ ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima atau hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Artinya, variabel yang bersangkutan tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap penyerapan deposito berjangka pada bank swasta di Surabaya.

**- Uji F**

Dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama (*simultaneously*) terhadap perubahan variabel tergantung. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_k$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_k$$

Apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya, variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap perubahan variabel tergantung dan secara statistik

pengaruh tersebut signifikan. Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya, variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan variabel tergantung dan secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Selanjutnya hipotesis kedua dapat diketahui dengan cara melihat dan membandingkan nilai koefisien korelasi parsial ( $r^2$ ) dari masing-masing variabel bebas. Berdasarkan analisis regresi ini, maka akan diperoleh berbagai informasi, antara lain : koefisien regresi parsial ( $\beta_i$ ), koefisien determinasi ( $R^2$ ), koefisien korelasi parsial ( $r^2$ ) nilai statistik F, nilai statistik t, dan sebagainya. Dari informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian dan interpretasi model untuk memperoleh kesimpulan.

#### - Uji $R^2$

Dipakai untuk menentukan apakah variabel bebasnya dapat menerangkan variabel tergantung dengan baik,  $R^2$  nilainya berkisar antara 0-1. Suatu model *time series* apabila  $R^2$  mencapai angka 1 maka dapat dikatakan variabel bebas dapat menerangkan variabel tergantung dengan sempurna. Sebaliknya, apabila  $R^2$  mencapai angka 0 berarti model tersebut dapat dikatakan variabel bebasnya tidak dapat menerangkan variabel tidak bebas.

diformulasikan secara matematis sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian diubah ke dalam bentuk model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \delta$$

dimana:

$Y$  = Variabel Terikat

$X_1$  = Variabel Bebas ke-1

$X_2$  = Variabel Bebas ke-2

$X_3$  = Variabel Bebas ke-3

$\beta_0$  = intercept / konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas





$\delta$  = error term / variabel pengganggu diluar model.

Selanjutnya untuk memperoleh nilai parameter ( $\beta_1$ ) digunakan metode rata-rata kuadrat terkecil biasa (OLS). Analisis yang pertama kali dikembangkan oleh Carl Frederich Gauss (1821) ini merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias (BLUE). Kondisi tersebut akan terjadi apabila dipenuhi oleh beberapa asumsi di bawah ini :

1. Rata-rata gangguan sama dengan nol. Dengan kata lain, apabila sampel diulang-ulang dengan nilai variabel bebas yang tetap, maka kesalahan dalam tiap observasi akan mempunyai rata-rata sama dengan nol (saling meniadakan).
2. Homoskedastisitas, yaitu bahwa varians gangguan tidak berbeda dari suatu observasi ke observasi lainnya. Tepatnya tiap observasi mempunyai reliabilitas yang sama.
3. Non otokorelasi, yaitu bahwa gangguan dari satu observasi tidak berkorelasi dengan gangguan di observasi lainnya. Asumsi ini menegaskan bahwa nilai variabel terikat lainnya hanya diterangkan (secara sistematis) oleh variabel bebas dan bukan oleh gangguan.
4. Gangguan tidak berkorelasi dengan variabel bebas. Asumsi ini mempunyai implikasi bahwa nilai variabel bebas tidak berubah dari satu sampel ke sampel lainnya.
5. Gangguan didistribusikan menurut distribusi normal. Asumsi ini diperlukan terutama untuk peramalan dan pengujian hipotesis.
6. Nilai variabel bebas berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Dalam hal lebih satu variabel bebas, semua variabel diasumsikan independen satu terhadap lainnya.

Suatu model yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi Klasik tersebut agar dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Apabila suatu model mengalami gangguan maka hasil yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini dilakukan tiga uji asumsi klasik yaitu autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian**

##### **5.1.1 Tinjauan Perkembangan Kondisi Perbankan di Indonesia (Syariah dan Konvensional)**

Mantabnya kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 1996 membawa pengaruh pada kondisi perbankan di Indonesia, namun kondisi yang cukup mantab tahun 1996 ini mengalami perubahan sejak juli 1997 dengan akibat penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika yang dengan cepat menjadi krisis keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menetralkan kondisi ini, tetapi tidak menunjukkan hasil yang baik.

Kemerosotan dan gejolak nilai tukar terus berlanjut, hal ini semakin mengurangi kepercayaan investor terhadap kemampuan pengelolaan dan prospek ekonomi Indonesia semakin berkurang, hal ini ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dimana masyarakat menarik dana besar-besaran dari perbankan nasional, memindahkan dana ke bank asing lebih kuat, atau bahkan digunakan untuk membeli valuta asing yang sedang sangat menguntungkan saat itu.

Kesulitan likuiditas yang dialami perbankan nasional diatasi pemerintah dengan memberikan bantuan likuiditas yang mendorong kenaikan Jumlah Uang Beredar (JUB) akibat tekanan inflasi. Tercatat tekanan inflasi nasional akhir tahun 1997 mencapai 11,05 % , pertumbuhan ekonomi merosot 4,9 % dan nilai tukar terhadap dollar AS mencapai Rp. 5.442,- rupiah perdolar AS. Pada awal noember 1997 pemerintah mengambil kebijakan untuk melikuidasi 16 bank yang insolvent.

Ketergantungan Ekonomi Indonesia terhadap negara-negara asing menyebabkan semakin parahnya kondisi perekonomian Indonesia, tercermin dalam depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus level Rp.10.000 pedolarnya semakin rusaknya prediksi dengan berbagai kejadian sosial politik, seperti kerusuhan diberbagai daerah dan pergantian pimpinan negara pada bulan Mei 1998.

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, menghindari rush terhadap perbankan nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan seluruh kewajiban bank yang diantaranya adalah dana pihak ketiga (DPK) milik masyarakat yang dituangkan pada Keppres No. 26 Tahun 1998. Selanjutnya pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk memperbaiki kinerja bank-bank yang kondisinya tidak sehat, selain itu bank Indonesia, juga menyempurnakan kualitas akiva produktif (KAP), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan permodalan bank.

Di tahun 1998 pemerintah melakukan 2 kali pembekuan usaha bank yaitu pada tanggal 4 April 1998 dan tanggal 21 agustus 1998. Pada tahap pertama (4 april 1998) pemerintah membekukan operasi 7 bank umum yaitu; Bank Centris, Bank Hokindo, Bank Kredit Asia, Bank Pelita, Bank Subentra dan Bank Surya. Selanjutnya pada tanggal 21 agustus 1998 pemerintah membekukan 3 bank umum yaitu; Bank Dagang Indonesia, Bank Umum Nasional dan Bank Modern.

Pada tahun 1999 perkembangan dunia perbankan juga tidak kunjung menggembirakan, pada tanggal 13 maret pemerintah kembali membekukan kegiatan usaha pada 38 bank swasta yang bermasalah, dan pada tanggal 17 Mei 1999 Pemerintah melakukan perubahan yang mendasar terhadap peran dan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan diundangkannya UU RI No. 23 tahun 1999, yang menjelaskan status Bank Indonesia menjadi lembaga Independen yang mempunyai tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia dan kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan pada BUMN yang ditunjuk yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara dan PT. Permodalan Nasional Mandiri.

Dengan demikian kondisi-kondisi diatas praktis semakin melumpuhkan sistem intermediasi perbankan dalam menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi produktif. Sebagai gantinya dalam rangka menanggulangi dampak negatif krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensional ini terhadap kegiatan usaha kecil dan golongan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah

melakukan berbagai upaya antara lain dengan melaksanakan program untuk mendukung penyediaan jaring pengaman sosial yang merupakan salah satu kesepakatan pemerintah dengan IMF. Tercatat sebanyak 13 skim kredit program diluncurkan oleh pemerintah sebagai kelanjutan kredit tahun sebelumnya.

Kolapsnya kondisi perbankan dan kondisi perekonomian pada masa itu tidak demikian halnya dengan kondisi yang dialami Bank Syariah, semenjak berdirinya bank syariah (dipelopori dengan didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991) justru dinyatakan sehat oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kekuatan Perbankan syariah selama menghadapi krisis layak untuk diperhitungkan. Hal ini mendorong bermunculannya bank-bank syariah pasca tahun 1998 antara lain; Bank Syariah Mandiri, disusul dengan Bank IFI serta Bank Negara Indonesia yang membuka unit usaha syariah, yang disusul oleh Bank Jabar dan seterusnya hingga kondisi saat ini seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Pertumbuhan aset, DPK, Kelembagaan Bank Syariah**

	Tahun 1998	Bulan Februari 2003
Aset	479 Miliar	4.403 Miliar
Dana Pihak Ketiga	392 Miliar	3.112 Miliar
Pertumbuhan Kelembagaan	1 Bank Umum Syariah; 78 BPRS	2 Bank Umum Syariah, 6 Unit Usaha Syariah, 11 Kan Cab Pembantu, dan 58 Kantor Kas

Sumber: Bank Indonesia, FE-UI

Apabila diperhatikan data-data yang disajikan diatas maka tidaklah berlebihan apabila kondisi perbankan syariah di Indonesia dinyatakan sedang mengalami masa pertumbuhan yang cukup tinggi dan diharapkan suatu saat nanti akan mampu menopang pertumbuhan sektor riil.

### 5.1.2 Pertumbuhan produk-produk Perbankan Syariah

Pesatnya pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah, utamanya merupakan akibat dari terbatasnya instrumen pasar syariah karena pelaku pasar yang masih sangat sedikit sehingga bank lebih tertarik untuk melakukan

pembiayaan langsung ke sektor riil. Tidak berbeda dengan kondisi pada bank umum syariah di negara-negara lain didunia, Pembiayaan murabahah adalah skim pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah. Hal ini terjadi karena sistem mudharabah lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan juga oleh pegawai bank yang selama ini telah mengenal sistem bunga sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit sekali diterapkan kecuali di dua negara yaitu Iran (48 %) dan Sudan (62 %) (Adiwarman, 2000:4).

**Tabel 5.2**  
**Dominasi Sistem Jual Beli Pada Bank Syariah di Beberapa Negara**

Jenis	Malaysia	Bahrain	Bangladesh	U. Emirat	Jordan	Turki
Murabahah	17.8	69.9	51.1	96.3	43.6	17.3
B. Bitsaman Ajil	68.4	--	9.9	--	--	--
Ijarah	8.7	13.3	13.0	--	--	60.6
Qard Hasan	**	9.2	3.7	--	0.3	**
Musarakah	1.7	7.6	--	2.1	2.8	0.7
Mudharabah	**	--	3.2	1.6	--	--
Lainnya	3.4	--	9.9	--	53.3	21.4

\*\* = kurang dari 0.1%

Malaysia = Bank Islam Malaysia Berhad

Bahrain = Faysal Islamic Bank of Bahrain

Bangladesh = Islamic Bank of Bangladesh

U. Emirat = Jordan Islamic Bank

Turki = Faysal Financial

Sumber : Sudin Haron, 1996, Prinsip dan dan Operasional Perbankan Islam, Kuala Lumpur : Berita Publishing .

Tabel berikut ini menunjukkan besarnya portofolio aktiva Produktif dunia.

**Tabel 5.3**  
**Portofolio Aktiva Produktif Bank Syariah Internasional**

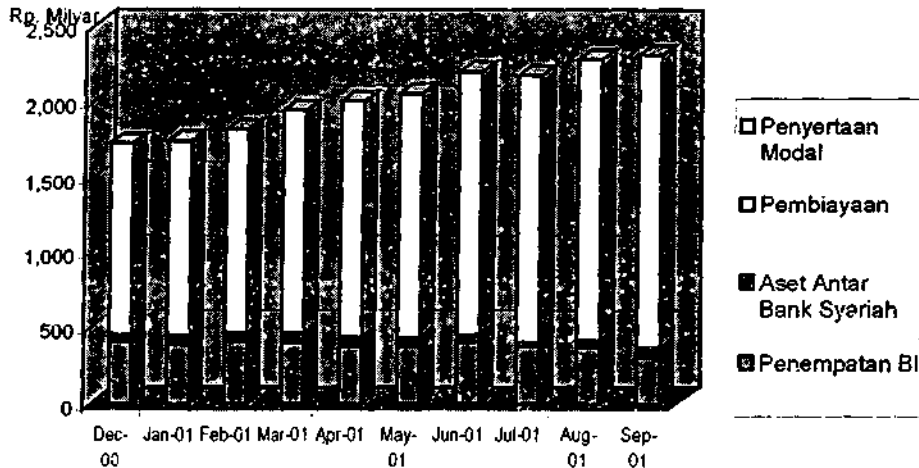
Jenis Akad	Nominal (\$000)	Share (%)
Murabahah	178,088	
Ijarah	29,985	
Mudharabah	57,743	
Musarakah	18,637	
Lainnya	87,367	
<b>Total Aset</b>	<b>366.802</b>	<b>100.00</b>

Data 86 bank syariah internasional

Sumber: Aggarwal and Yousef (2000) dalam Kajian Laporan BI, 2000

Demikian pula kasus dominasi produk jual beli ini juga terjadi di Indonesia ini dapat dilihat dari dalam komposisi penempatan portofolio Bank Umum Syariah di Indonesia yang lebih memfokuskan penempatan Aktiva Produktifnya pada skim pembiayaan dibandingkan yang lain

**Gambar 5.1**  
**Proporsi penempatan portofolio pada Bank Syariah di Indonesia**



Keterangan	II/ 2002	III/2002	
I/2003			
A. Total aset	3,677.5	4,134.8	
4,446.0			
B. Penyaluran Dana	3,617.6	4,105.3	
4,410.7			
1. Pembiayaan	3,179.1	3,469.2	
3,483.7			
- Musyarakah	70.1	68.0	68.2
- Mudharabah	475.2	501.2	495.7
- Piutang Murabahah	2,230.3	2,469.8	
2,491.5			
- Piutang Salam			
- Piutang Istishna	220.7	226.0	232.0
- Lainnya	182.8	154.5	167.1
2. Penempatan pada BI	275.0	451.8	759.7
3. Penempatan pada bank lain	139.9	126.2	119.2
4. Lainnya 2)	23.6	58.1	48.1
C. Pendanaan	2,777.4	3,2209.1	
3,429.6			

1. Dana pihak ketiga	2,500.2	2,956.2	
3,150.6			
- Giro wadiah	365.4	358.0	321.2
- Tabungan Mudharabah	773.8	838.7	982.5
- Deposito Mudharabah	1,361.0	1,759.5	
1,846.9			
2. Kewajiban pada BI	40.1	38.6	37.7
3. Kewajiban pada bank lain	35.7	32.9	35.9
4. Pembiayaan yang diterima	201.4	201.4	205.4
<b>D. Permodalan</b>	<b>70.7</b>	<b>575.1</b>	<b>623.6</b>
1. Modal disetor	523.7	523.7	523.7
2. Cadangan	32.8	32.8	32.8
3. Laba/rugi tahun lalu	(7.7)	(7.7)	58.2
4. Laba/rugi tahun berjalan	43.8	52.5	17.7
<b>E. Rasio (%)</b>			
1. FDR 3)	127.2%	117.4%	
110.6%			
2. NPF 4)	4.20%	3.98%	4.14%
3. ROA 5)	2.43%	0.84%	1.59%
4. Current ratio 6)	5.6	4.9	3.6
5. CAR 7)	14.1%	12.4%	13.7%

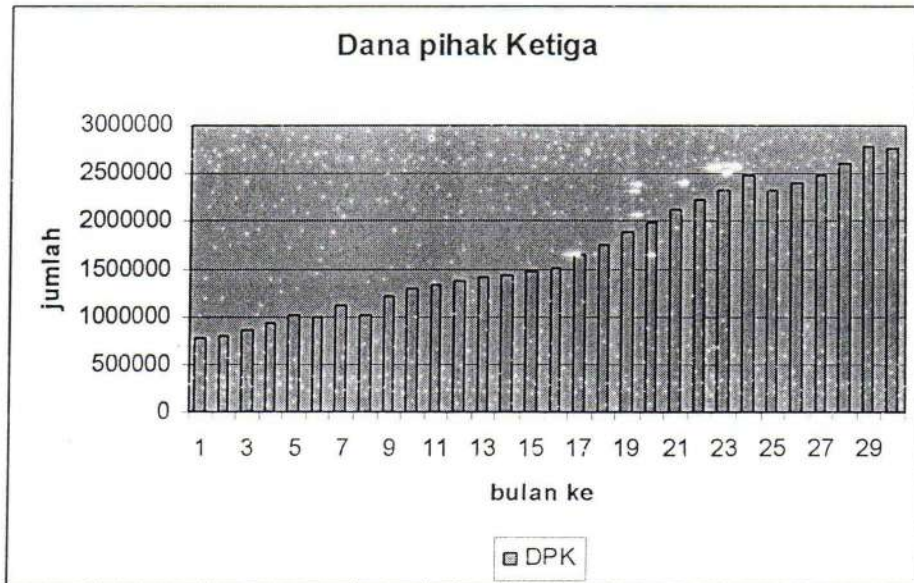
#### 5.1.2.1 Gambaran perkembangan produk-produk penghimpunan dana bank Syariah.

Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia sambutan masyarakat dirasa kurang terbukti pada jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang masih sedikit serta masih banyaknya masyarakat Islam yang awam dan tidak memahami apa dan bagaimana bank syariah tersebut. Namun setelah dinyatakan sebagai bank yang sehat, maka pasca krisis moneter masyarakat mulai banyak yang mengakui keberadaannya dan tidak hanya itu bermunculannya bank syariah di Indonesia semakin menambah besarnya porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mampu dihimpun oleh bank syariah.

Sebagai contoh penghimpunann dana pihak ketiga perbankan syariah dalam tahun 2002 yitu sebesar 61,5 % , jauh melampaui pertumbuhan Dana pihak ketiga perbankan nasional yang tumbuh 4,8 % dalam tahun 2002. Tambahan dana pihak ketiga perbankan syariah memberikan kontribusi sebesar 2,9 % dari total tambahan DPK perbankan nasional, hal menandakan adanya indikasi respon positif masyarakat terhadap Bank Syariah.

Bank Indonesia dalam hal ini mengategorikan produk-produk penyerapan dana bank syariah berdasarkan akad-akadnya antara lain; giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

**Gambar 5.2**  
**Dana Pihak Ketiga Yang Dikelola Bank Syariah**



Sumber : Bank Indonesia

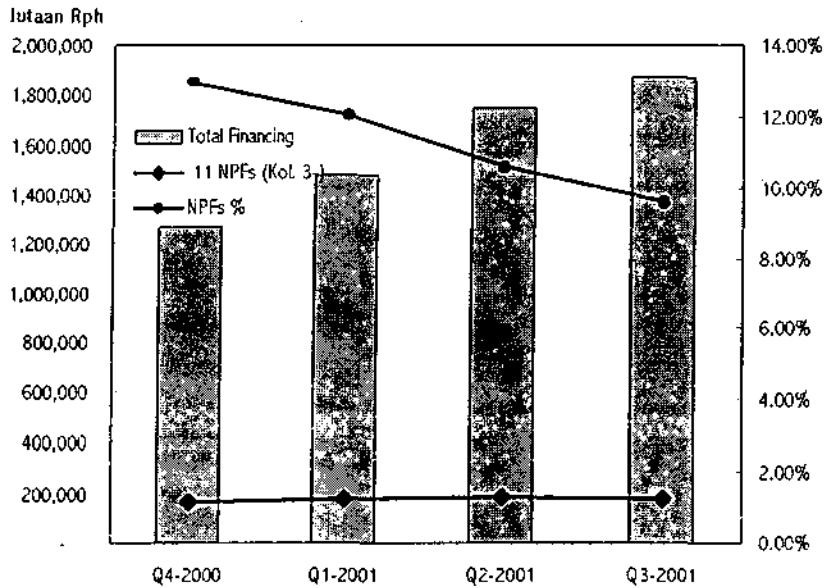
#### 5.1.2.2 Gambaran perkembangan produk-produk pembiayaan pada bank Syariah.

Pesatnya pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang mulai marak akhir-akhir ini menunjukkan alternatif pembiayaan ini mulai dilirik oleh masyarakat yang mengindikasikan besarnya peranan bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi serta penggerak sektor rill. Dalam melakukan pembiayaan ini kontrol tingkat NPF (*Non Performing Finanicng*) Penerapan prinsip kehati-hatian bank syariah juga mulai diterapkan dengan baik di Bank Syariah. Dimana memiliki tingkat NPF yang relatif rendah, jika dibandingkan bank konvensional, karena jumlahnya dapat selalu dipertahankan dibawah 5 % dalam 2 tahun terakhir. Yaitu 4,01 % pada tahun 2001 dan 4,12 %



pada tahun 2002. dan sebagai pembandingan pada periode yang sama Non Performing Loan (NPL) Perbankan Nasional sebesar 12,1 % dan 8,1 %.

**Gambar 5.3**  
**Ringkasan Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah,**  
**Beberapa tahun terpilih**



Sumber; Bank Indonesia

**Tabel 5.4**  
**Ringkasan Prestasi Bank Syariah, Bulan terpilih**

Keterangan	Q4-2000	Q1-2001	Q2-2001	Q3-2001
<b>Bank Umum Konvensional</b>				
DPK	686.7	717.4	737.5	764.3
Kredit	308.4	328.0	349.7	375.2
LDR	44.91%	45.72%	47.42%	49.09%
<b>Bank Syariah</b>				
DPK	1.0	1.2	1.4	1.5
Pembiayaan	1.3	1.5	1.7	1.9
FDR	123.54%	122.15%	121.48%	122.22%
Share Pembiayaan B. Syariah	0.41%	0.17%	0.19%	0.20%

Sumber; Statistik Bank Indonesia

Dilihat dari jenis pembiayaan yang diberikan, sebagian besar (65%) pembiayaan bank umum syariah masih disalurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Sementara, pembiayaan musyarakah dan mudharabah hanya memiliki kontribusi 2,20% dan 24%. Bila diamati perkembangan sejak triwulan IV / 2000 terlihat kecenderungan turunnya porsi pembiayaan mudharabah yang diberikan dan bertambahnya porsi pembiayaan murabahah (Tabel 3).

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 1998 dan tahun 1999 dimana masih hanya terdapat 1 bank Syariah yang sudah mampu beroperasi secara lancar, sebagai berikut.

#### **Porsi Pembiayaan ( % ) bank Muamalat Indonesia**

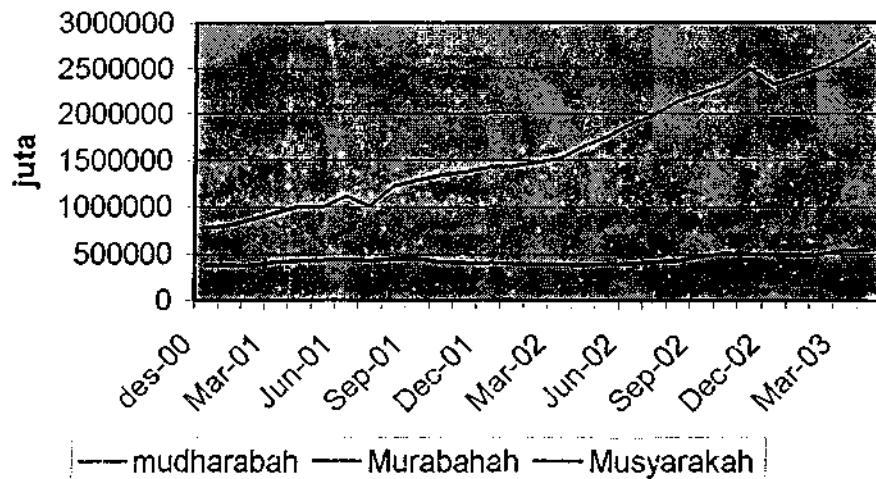
Tipe Pembiayaan	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Revenue/ Rofit Sharing	0.64%	0.05%	0.59%	2.89%	8.28%	25.59%	51.62%
Mark-Up	97.76%	99.74%	99.3%	96.59%	91.41%	73.15%	47.82%

Tahun 2001, sampai dengan akhir tahun tercatat pembiayaan yang diberikan (PYD) adalah sebesar 61,3 % atau sebesar Rp. 2,05 T dan pada akhir tahun Tahun 2002 pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 59,9 %

Tahun 2002, besarnya porsi murabahah terhadap total Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah sampai dengan akhir 2002 total penyaluran kredit senilai 3,47 Triliyun sekitar 71,85 % disalurkan dalam bentuk murabahah. Sementara, pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki kontribusi 14,45 % dan 11,96 % .

**Gambar 5.4**  
**Perkembangan Beberapa skim Pembiayaan Pada bank syariah di**  
**Indonesia**

### Pembiayaan



Sumber : Bank Indonesia berbagai edisi, diolah

Dari gambar diatas dapat diperhatikan bahwa saat ini produk pembiayaan bank syariah yang tumbuh paling pesat adalah pembiayaan dengan skim murabahah (pembelian dengan mark up).

Dominasi penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor , antara lain karakteristik pembiayaan murabahah yang return nya dapat diperkirakan serta relatif lebih mudah dalam pengelolaan likuiditas bank. Selainitu , Penghitungan yang mudah sesuai permintaan nasabah merupakan latar belakang mengapa pembiayaan murabahah banyak disukai.

(Harisman dalam Lutfi Hamidi, 2003: 7).

### 5.1.3. Gambaran Pertumbuhan Dana Pihak ketiga yang dihimpun Bank Konvensional

Perkembangan komposisi deposito dalam tahun 1999 akhir sampai dengan 2001 masih sangat didominasi oleh deposito yang sebagian besar berasal dari peningkatan deposito rupiah, hanya saja trendnya berubah jika pada tahun 2000 masyarakat lebih memilih dalam penenman jangka pendek maka tahun 2001 masyarakat lebih memilih penanaman dalam jangka panjang. Secara umum kondisi ini disebabkan oleh; masih tingginya penawaran suku bunga deposito oleh beberapa bank.

**Tabel 5.5**  
**Posisi DPK Bank Konvensional, tahun terpilih**

	Posisi (triliyun Rp)			Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)	
	1999	2000	2001	2000	2001	2000	2001
<b>Giro</b>	111,8	161,5	186,2	44,4	15,3	23,1	23,3
Rupiah	68,5	103,6	120,0	51,3	15,8	64,2	64,5
Valas	43,4	57,9	66,2	33,4	14,3	35,8	35,5
<b>Deposito</b>	382,8	384,7	439,9	0,5	14,4	55,0	55,2
Rupiah	301,4	296,7	344,9	-1,6	16,2	77,1	78,4
Valas	81,4	88,0	95,1	8,1	8,0	22,9	21,6
<b>Tabungan</b>	123,0	152,9	171,3	24,4	12,0	21,9	21,5
<b>Total</b>	617,6	699,1	797,4	13,2	14,1	100	100
Rupiah	492,9	553,2	636,2	12,2	15,0	79,1	79,8
Valas	124,8	145,9	161,2	16,9	10,5	20,9	20,2

Pada tahun 2001 penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan telah mengalami peningkatan sebesar 14,1 % faktor penyebab utamanya antara lain adalah; (1) peningkatan suku bunga yang ditawarkan bank-bank (khususnya suku bunga deposito yang mendekati suku bunga penjaminan), (2) terjaganya kepercayaan masyarakat sering dengan dilanjutkannya program penjaminan pemerintah dan restrukturisasi perbankan.

Sampai dengan akhir 2002, struktur DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan nasional mengalami peningkatan, total sebesar Rp.815,4 triliyun atau

tumbuh sebesar 22,57 % dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada deposito, dalam rupiah. Yang meningkat dari Rp. 344,9 triliun menjadi Rp. 359,8 triliun hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan menurunnya tingkat suku bunga deposito dan SBI, dan mulai pulihnya fungsi intermediasi perbankan sehingga bank –bank mulai mengalirkan dananya ke sektor produktif seperti kredit.

#### **5.1.4 Gambaran Pertumbuhan Kredit modal kerja, konsumtif, investasi pada Bank Konvensional**

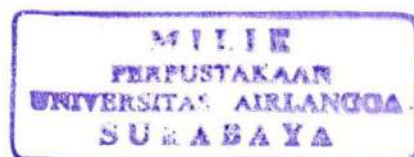
Pada tahun 1998, sehubungan dengan masih lesunya kondisi perekonomian, posisi kredit perbankan sejak Juli 1998 berangsur-angsur menurun dan hal ini merata pada seluruh sektor seiring dengan kondisi yang terjadi. Kredit di sektor perdagangan mengalami pertumbuhan negatif yang tertinggi yaitu sebesar 33,3 % sedangkan pada sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif terendah, hal ini terkait dengan merosotnya pendapatan riil masyarakat dan terganggunya jalur distribusi. Sementara kecilnya penurunan kredit sektor pertanian adalah akibat membaiknya kinerja ekspor beberapa komoditas hasil-hasil pertanian selama masa krisis, dan penyaluran kredit di sektor *real estate* dan pemilikan perumahan sampai dengan akhir tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 20 %. Dan secara kuantitas penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) menurun tajam terkait dengan penutupan beberapa BUSN.

Tahun 2000, Posisi kredit perbankan meningkat sebesar 15,5 % menjadi Rp. Rp. 320,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berasal dari kredit rupiah dan kredit valuta asing yang masing-masing naik sebesar Rp. 18,9 triliun (11,1 %) dan Rp. 24,2 triliun (20,5 %). Apabila pengaruh nilai tukar tersebut dihilangkan, kredit dalam valuta asing menjadi turun sebesar 10,8 % sehingga posisi kredit dalam tahun 2000 sesungguhnya hanya meningkat sebesar 2,2 %. Peningkatan kredit rupiah disebabkan antara lain adanya penyaluran kredit baru dan penjualan kembali yang telah direstrukturisasi oleh BPPN ke sektor perbankan. Rendahnya pertumbuhan kredit di tahun 2000 antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) Debitur potensial masih terbatas karena banyaknya debitur berskala besar yang masuk dalam proses restrukturisasi di

BPPN, sebagian kredit baru disalurkan dalam bentuk kredit menengah dan dan kredit kecil dengan tujuan konsumsi.(2)Perbankan menilai resiko usaha masih tinggi, meskipun terdapat permohonan kredit dan nasabah baru.(3) Para debitur belum melakukan penarikan atas komitmen kredit secara optimal karena belum didukung oleh iklim usaha yang kondusif .(4) Beberapa bank rekap yang masih mengalami permasalahan likuiditas mengahdapi kesulitan untuk menjual obligasinya karena belum berkembangnya pasar sekunder obligasi pemerintah.(5)Beberapa bank masih mengahadapi permasalahan yang terkait dengan pemenuhan CAR dan pelanggaran BMPK.

Pada tahun 2001 sampai dengan akhir tahun posisi kredit perbankan mencapai peningkatan sebesar 11,9% (menjadi Rp. 358,6 triliun. Peningkatan berasal dari kredit rupiah sebesar Rp. 50,6 triliun(28,4%), kredit dalam valas mengalami penurunan Rp. 12,3 triliun (8,7%). Peningkatan kredit rupiah antara lain disebabkan adanya penyaluran kredit baru dan pejualan kembali kredit yang direstrukturisasi oleh BPPN ke sektor perbankan, dan penurunan kredit valuta asing disebabkan karena adanya pelunasan, penghapus bukuan dan penjualan kedit. Selama tahun laporan, kredit baru yang telah disalurkan oleh perbankan adalah sebesar Rp. 56,8 triliun, atau rata-rata Rp. 4,7 triliun perbulan .

Walaupun kredit yang disalurkan meningkat, tetapi *loan to deposit Rate* (LDR) tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan tahun sebelumnya (33% hal ini menunjukkan belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan yang dilakukan, banyaknya kredit yang ditarik (*undisbursed loan*) mencapai plafon sebesar Rp. 70,5 triliun. Hal ini akibat tingginya resiko dunia usaha kondisi ekonomi makro belum membaik, seperti belum stabilnya nilai rupiah dan tingkat suku bunga kondisi politik dan keamanan juga faktor yang sangat signifikan berpengaruh. Dari sisi internal adalah juga karena banyak bank yang asih melakukan konsolidasi berupaya memenuhi ketentuan yang bersifat prudensial perbankan, masih banyaknya keengganan bank dalam menyalurkan kredit pada sektor korporasi akibat adanya trauma dari pengalaman masa lalu, namun dalam tahun ini mengalami perubahan yang positif dimana NPL-nya mengalami penurunan dari Rp. 60 trilyun menjadi 43,1 trilyun namun perbaikan



ini adalah akibat penambahan kredit baru sehingga menambah jumlah kredit yang lancar, perbaikan kredit yang kurang lancar dan macet.

Pada tahun 2002, sampai dengan triwulan akhir posisi kredit menunjukkan peningkatan dari Rp. 387,7 triliun pada triwulan III/2002 menjadi Rp. 402,2 triliun atau tumbuh sekitar 3,7% (Rp. 14 triliun ), walaupun pertumbuhan pada triwulan IV/2002 lebih lambat dibandingkan Triwulan sebelumnya 8,5 % (Rp.30,3) triliun. Sumber peningkatan kredit terbesar ini terutama berasal dari penyaluran kredit baru, yang sampai dengan bulan november 2002 total kredit baru yang disalurkan jumlahnya adalah Rp. 72,2 triliun.dan paling banyak disalurkan oleh kelompok bank kategori A, eks BTO dan BUMN masing-masing sebesar Rp. 4,5 triliun, Rp. 9,2 triliun, dan Rp. 2,5 triliun. Dan dari sekian banyak jumlah kredit yang disalurkan sepanjang tahun 2002 sebesar 41,9 % Dari total kredit telah disalurkan ke sektor UKM. Hal in menunjukkan adanya perbaikan pada fungsi intermediasi perbankan dan membaiknya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ditandai dengan komposisi kredit sampai dengan tiwulan III tersebut adalah sebagai berikut; kredit modal kerja masih menunjukkan pangsa yang terbesar penyaluran kredit baru yaitu sebesar Rp. 7,2 triliun (60,4 %), diikuti kredit investasi sebesar Rp. 2,8 triliun (23, 2%) dan kredit konsumsi sebesar Rp. 1,9 triliun (16,4 %).

#### **5.1.5 Perkembangan Perundang-Undangan perbankan Syariah Di Indonesia**

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari adanya kepastian hukum yang diatur oleh pemerintah melalui perangkat undang-undang yang dikeluarkan. Peraturan tentang perbankan syariah dari segi perundangan negara, keberadaan bank Syariah mulai tercakup dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan pada tahun 1998 yang didalamnya telah memberikan banyak peluang dan kepastian pengembangan bank Syariah melalui UU No. 10 tahun 1998 yang juga merupakan perubahan serta penyempurnaan atas UU No. 7 tahun 1992.

UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3. Pasal ini merupakan revisi terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah 'menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah' yang menyangkut 3 hal (Y. Sri Susilo, 1999: 109):

- a. Istilah bagi hasil diganti dengan prinsip syariah meskipun esensinya tidak berbeda.
- b. Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan 'Peraturan Pemerintah' kemudian diganti dengan 'ketentuan Bank Indonesia'.
- c. UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga jasa lain'. Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal mencakup penghimpunan dan penggunaan dana.

Kepengurusan Bank Syariah telah ditetapkan berdasarkan UU No. 10 1998 tentang perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 dan SK Dir BI No. 32/ 34/ KEP/ DIR 12 Mei 1999 tentang "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah",kepengurusan bank syariah terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi, disamping itu bank wajib memiliki dewan syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang tugasnya diatur oleh Dewan Syariah Nasional. (Y. Sri Susilo dkk, 1999:112).

Sedangkan peraturan mengenai kegiatan usaha Bank Syariah ini sendiri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/ 34/ KEP/ DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan Usaha Syariah adalah : *Hiwalah, Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah: Muttlahah, Muqayyadah, Murabahah, Musyarakah, Qard, Al-Qard ul Hasan, Al Rahn, Salam, Sharf, Ujr, Wadi'ah :Wadiyah Yad Damanah dan Yad Amanah, Wakalah.*



Mulya Siregar (2000: 12) berpendapat bahwa, pada dasarnya perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi bank Syariah secara umum dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu peraturan yang terkait dengan:

- A. Kelembagaan yang meliputi peraturan mengenai tata cara pendirian bank, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank. Peraturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia adalah SK Direksi Bank Indonesia No. 32/ 33/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan SK Direksi BI No. 32/ 34/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999. Tentang Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah.
- B. Pengaturan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Syariah. Ketentuan yang mengatur adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2 /7/ PBI/2000 tentang giro wajib minimum, No. 2/ 4/ PBI/ 2000 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/ 3/ PBI/ 1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan Kliring lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Hasil Kliring Lokal, No. 2/ 8/ PBI/ 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan No. 2/ 9/ PBI/ 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- C. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*): pengaturan yang diperlukan bagi bank Syariah untuk melaksanakan prinsip kegiatan usaha yang berhati-hati dan berdasarkan praktek-praktek usaha yang sehat.
- D. Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Syariah. Peraturan ini meliputi : Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Sentral : ketentuan Standar akuntansi dan audit ; ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah); Standarisasi fatwa produk Syariah, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Sampai dengan tahun 2003, beberapa peraturan bank syariah yang telah dihasilkan oleh bank Indonesia selaku otoritas moneter adalah antara lain :

1. PBI No. 2/ 15/ PBI/ 2000 Tanggal 12 Juni 2000 Penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian Akhir Transaksi Antar- Bank atas Hasil Kliring Lokal

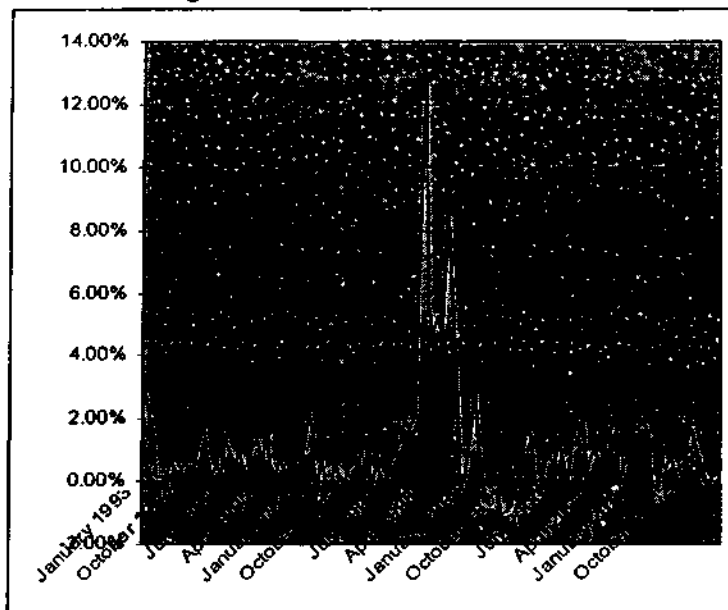
2. PBI No. 4/ 1/ PBI/ 2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
3. PBI No. 5/ 3/ 2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah.

#### Gambaran Variabel-variabel :

##### 1. Gambaran Pertumbuhan Inflasi di Indonesia

Pada dasarnya inflasi merupakan gejala ekonomi berupa naiknya tingkat harga (Boediono, 1990:189). Pada kondisi stabil sebelum krisis moneter di Indonesia tingkat inflasi pertahun tidak pernah menginjak level 2 digit. Inflasi tertinggi dialami pada tahun 1998, dimana pada saat itu inflasi telah mencapai 77,63% pertahun dengan komponen penyebabnya adalah meningkatnya harga makanan ; 118,37%, harga sandang ; 98,69%, makanan jadi meningkat 94,32% , biaya kesehatan meningkat;86,14% , transpor meningkat;55,55% perumahan meningkat 47,47% dan biaya pendidikan sebesar 48,01% (Statistik Indonesia,BPS, 1998) . Sedangkan pada periode selanjutnya inflasi cenderung menurun lebih moderat seiring dengan terciptanya secara bertahap kestabilan ekonomi.

**Gambar 5. 5**  
**Perkembangan Consumer Price Indeks di Indonesia**



Sedangkan perhitungan pertumbuhan inflasi tahunan menurut bank Indonesia berturut-turut semenjak tahun 1998-2001 masing-masing adalah ; 11,05%, 77,63%, 2,03%, 9,35%, 12,55%; sedangkan perekonomian Indonesia yang mencatat terjadinya deflasi justru terjadi pada bulan maret kuartal I tahun 2002 akibat adanya koreksi harga disektor bahan makanan, sandang setelah meningkat tinggi di bulan februari, 2002 deflasi ini belangsung sampai dengan bulan agustus 2002. Secara tahunan laju inflasi kelompok food mencapai 13,78% lebih rendah dibandingkan nonfood yang tercatat 14,34% dan secara tahunan inflasi kelompok *traded* tercatat sebesar 12,97% adapun kelompok barang-barang *non trade* mengalami deflasi sebesar minus 16,19%. Trend pertumbuhan Inflasi tahunan Indonesia di tahun 2002, deflasi pertama pasca krisis ekonomi timbul akibat adanya *supply shock* dan beberapa dampak kebijakan pemerintah. Kondisi menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar pada bulan maret mampu menurunkan tingkat inflasi kelompok barang-barang *trade*, inflasi terus-menerus menunjukkan penurunan dari 14,42 % pada bulan maret kemudian stabil pada kisaran 10 % antara bulan Juli sampai dengan desember 2002.

Pada tahun 2003 kuartal I sampai dengan bulan mei, kondisi inflasi di Indonesia relatif menurun diandingkan laju inflasi pada tahun sebelumnya. Sama halnya tahun sebelumnya sampai dengan bulan mei terjadi deflasi yang berkepanjangan terhadap bahan makanan, sebgai dampak dilongarkannya kebijakan impor beberapa komoditas makanan hasil pertanian seperti, beras, tepung dsb sejak akhir 2002 yang lalu. Laju inflasi tahunan telah mencapai 8,74 dan terus mengikuti tren yang menurun pada pada bulan berikutnya yaitu berurut-turut ; 7,34; 7,12, 7,54%, 7,12%, dan 6,91% pada bulan mei. Perubahan indeks terbesar terjadi pada harga perumahan sedangkan kesehatan transportasi komunikasi, kesehatan serta sandang tidak mengalami trend penurunan yang signifikan/relatif wajar.

## 2. Pertumbuhan Tingkat Bunga Kredit (Kredit Investasi dan Modal Kerja)

Pertumbuhan tingkat bunga kredit baik kredit Investasi dan Kredit modal kerja sangat tergantung dari kondisi pasar dan dalam hal ini kebijakan bank sentral merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasinya.

Selama periode krisis tingkat suku bunga deposito di bank-bank umum komersial dapat dikatakan meningkat tinggi nilainya akibat salah satu kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat inflasi (*tight money policy*).

**Tabel 5.6**  
**Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja (%) Indonesia (1995-2003 II)**

Tahun	Kredit Investasi	Kredit modal kerja	Tahun	Kredit Investasi	Kredit modal kerja
1995/I	17,59	15,20	II	30,34	23,39
II	17,66	15,65	III	24,52	20,60
III	12,11	16,00	IV	21,68	18,80
IV	18,79	16,06	2000/I	19,59	17,01
1996/I	19,11	16,30	II	18,46	16,35
II	19,27	16,46	III	17,98	16,09
III	12,87	16,49	IV	17,80	16,78
IV	19,24	16,43	2001/I	17,85	16,94
1997/I	19,16	16,38	II	18,26	16,85
II	19,16	16,28	III	18,88	17,08
III	12,68	18,68	IV	19,20	17,64
IV	18,72	19,62	2002/I	19,32	18,03
1998/I	23,38	19,43	II	19,18	18,11
II	26,19	22,39	III	18,87	18,11
III	17,07	24,16	IV	18,42	17,82
IV	35,20	25,92	2003/I	18,26	17,82
1999/I	34,11	25,98	II	18,14	16,56

Sumber: Statistik Ekonomi, Bank Indonesia berbagai edisi.

Upaya penyerapan likuiditas oleh pemerintah telah mengakibatkan meningkatnya suku bunga SBI, baik berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan jika dibandingkan dengan posisi di tahun 2000 masing-masing sebesar 17,62 % - 17,63%. Walaupun secara nominal meningkat, suku bunga riil SBI yang terjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, secara riil akhir tahun 2001 suku bunga SBI 1 bulan hanya mencapai 5,07 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pengaruh tingkat SBI menjadi suatu tolok ukur tersendiri bagi bank untuk memutuskan apakah memperbanyak pengucuran kredit bagi modal kerja,

konsumsi dan investasi (sangat tergantung pada tingkat resiko dunia usaha termasuk iklim politik dan sebagainya) ataukah menyimpan dananya pada SBI. Hal ini memiliki korelasi

### 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Pada posisi akhir September 2001, *idle* yang ditiptkan bank umum syariah pada BI dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) masih lebih rendah dibandingkan dana SWBI bank yang jatuh tempo. Pada posisi tersebut dana SWBI bank yang jatuh tempo dan tidak ditiptkan kembali ke BI sebesar Rp 218 milyar. Dana bank sebesar itu lima kali lipat lebih besar dibandingkan dana serupa pada triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa SWBI Bukan merupakan alternatif yang mulai menarik bagi Bank Syariah untuk menempatkan portofolionya, sebagaimana Bank konvensional yang menjadikan SBI sebagai alternatif penempatan portofolionya. Dan sampai dengan triwulan I tahun 2003 posisi SWBI yang berada pada bank Indonesia tercatat sebesar Rp. 505,1 Milyar atau naik 26,3 % jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp. 389,6 Milyar..

Posisi SWBI dalam rangka penempatan dana perbankan syariah di Bank Indonesia kondisinya sangat berfluktuasi dan kondisi bonus yang diberikan sangatlah berbeda dengan kondisi tingkat bunga pada proses penetapan pada Sertifikat Bank Indonesia pada sistem perbankan Konvensional yang tinggi endahnya ditentukan berdasarkan nilai pasar Bunga pada perbankan nasional.

**Tabel 5.7**

**Tabel Posisi SWBI bln terpilih dalam Milyar**

<b>Bln</b>	04/00	12/00	05/01	09/01	03/02	05/02	07/02	12/02	01/03
<b>Outstanding</b>	507	291	265	208	339	129	387	542	783

Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan bonus SWBI bukanlah menjadi alternatif penempatan dana bagi bank syariah, seperti yang terjadi pada bank konvensional karena tren keduanya yang sangat berbeda dan fungsi

intermediasi bank syariah yang telah berfungsi dalam mengintermediasikan surplus ke sektor yang minus .

SWBI adalah salah satu instrumen moneter kontraktif berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian dari sisi moneter, turunnya jumlah SWBI kurang menguntungkan karena akan menambah jumlah uang beredar. Namun dari sisi lain, hal ini justru menguntungkan kegiatan bank syariah karena diharapkan dana yang tidak ditanam dalam SWBI akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif yang berguna bagi masyarakat yang pada akhirnya akan menggerakkan sektor riil.

## 5.2. Hasil Penelitian

### 5.2.1 Hasil REGRESI

#### 1. Analisis pengaruh secara Simultan

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dipertegas bahwa variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian ini meliputi 2 model persamaan fungsi yang berpengaruh terhadap murabahah dan mudharabah. Berikut ini ringkasan Hasil perhitungan Statistik.

**Tabel 5.8**  
**Ringkasan Hasil Perhitungan Statistik**

Keterangan	Murabahah	Mudharabah
R Multiple	0.995	0.935
R Square	0.989	0.874
Adj. R. Square	0.988	0.854
SE. Of Estimate	71390.88753	20808.8049
Durbin Watson	1.300	1.175
F Ratio	576.469	43.446
Sig. F	0.000	0.000

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa secara simultan keempat variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi/ pengaruh yang cukup besar dan signiikan terhadap variabel terikatnya yaitu pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya

nilai  $R^2 = 0,989$  untuk persamaan pertama (Murabahah) dan  $R^2 = 0,874$  untuk mudharabah. Hal ini dapat diartikan bahwa keempat variabel bebas dari persamaan ke-1 dan ke-2 secara simultan (bersama-sama) mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan pembiayaan murabahah dan mudharabah masing-masing sebesar 98.9 % dan 87.4%, sedangkan selebihnya masing-masing sebesar 1,1 % dan 12, 6 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar model. Sedangkan korelasi simultan dari masing-masing variabel bebas dari kedua persamaan terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dengan nilai  $R$ , masing-masing adalah sebesar 0.995 (99,55%) untuk murabahah dan 0.935 (93,5%) hal ini berarti bahwa untuk mudharabah. yang berarti bahwa tingkat korelasi secara keseluruhan variabel bebas cukup tinggi terhadap variabel terikatnya yaitu mendekati satu (1).

Kemudian untuk menguji signifikansi dari pengaruh secara simultan tersebut dapat dilihat dari uji statistik F, Dari perhitungan SPSS diperoleh bahwa  $F_{hitung}$  adalah sebesar 576.469 untuk murabahah dan 43.446 untuk mudharabah sedangkan  $F_{tabel}$  adalah sebesar 1.83 pada alfa = 5 %, dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sehingga pengaruh simultan ke 4 variabel bebas terhadap pertumbuhan mudharabah dan murabahah adalah signifikan.

## 2. Analisis Pengaruh secara Individual

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien, secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut.

### Persamaan pertama (Murabahah)

**Tabel 5.9**  
**Ringkasan Koefisien Regresi, T hitung dan Sig T**  
**Persamaan fungsi pertama variabel terikat Murabahah**

Variabel	Koefisien Reg	T hitung	Sig. T
Constanta	-2869320	-4.59	0.000
DPK	0.696	16.020	0.000
INFLASI	-21236.9	-1.850	0.076
Swbi	4800.791	0.598	0.555
Invcr	187504.4	43.953	0.001



Selanjutnya persamaan regresi sebagaimana dijelaskan pada bab IV, maka model persamaan garis regresi tersebut akan nampak sebagai berikut :

$$\text{Mrb} = -2869320 + 0.696 \text{ DPK} - 21236.9 \text{ INFL} + 187504.4 \text{ Invcr} \\ + 4800.791 \text{ Swbi}$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Nilai Konstanta Sebesar -2869320 berarti bahwa apabila keseluruhan variabel bebas tersebut tidak mengalami perubahan (dianggap konstan), dalam kaitan proyeksi nilai pertumbuhan murabahah sebagai fungsi estimasi dimasa datang maka hal ini akan mampu menurunkan nilai pembiayaan murabahah bank Syariah di Indonesia sebesar Rp. - 2.869.320 pengaruh variabel secara individual dianggap signifikan mengingat besarnya T hitung (-4.59) yang lebih besar dari T tabel (0.741).
- 2 Nilai koefisien untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.696, berarti peningkatan 1 Rupiah Dana Pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia akan memberikan sumbangan terhadap meningkatnya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar Rp 0,0844. pengaruh variabel secara individual dianggap signifikan mengingat besarnya T hitung (16.020) yang lebih besar dari T tabel (0.741).
- 3 Nilai koefisien inflasi sebesar -21236.9 berarti hal ini dapat diartikan bahwa Meningkatnya inflasi satu persen tiap bulannya akan mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan murabahah oleh bank Syariah sebesar Rp. 20.895 . pengaruh variabel secara individual dianggap signifikan mengingat besarnya T hitung (-1.850) yang lebih besar dari T tabel (0.741).
- 4 Pertumbuhan tingkat suku bunga kredit investasi bank Konvensional cukup besar dan dapat dikatakan signifikan pula pengaruhnya pada pertumbuhan pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia terbukti dari besarnya T hitung (43.953) yang lebih besar dari T tabel (0.741).



Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien variabel kredit konsumtif bank Konvensional sebesar 187504.4 Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan sebesar 1 % saja tingkat bunga kredit konsumtif bank konvensional maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank Syariah meningkat sebesar Rp. 187.504,4

5. Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) meskipun tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah, dengan nilai T statistik 0.598 lebih kecil dibandingkan T tabel (0,741) mempunyai kontribusi yaitu mampu meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar 4800.791.

**Persamaan Kedua :**

**Tabel 5.10**  
**Ringkasan Koefisien Regresi, T hitung dan Sig T**  
**Persamaan fungsi kedua variabel terikat (Mudharabah)**

Variabel	Koefisien Reg	T hitung	Sig. T
Constanta	1132.657	7.721	0.000
DPK	0.060	9.448	0.000
INFLASI	3372.433	1.116	0.275
Swbi	5459.212	2.309	0.029
Wkcr	-48900.5	-5.297	0.000

Selanjutnya persamaan regresi sebagaimana dijelaskan pada bab IV, maka model persamaan garis regresi tersebut akan nampak sebagai berikut :

$$Mdb = 1132.657 + 0.060 \text{ DPK} + 3372.433 \text{ INFL} - 48900.5 \text{ Wkcr} + 5459.212 \text{ Swbi}$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta Sebesar 1132.657 berarti bahwa apabila keseluruhan variabel bebas tersebut tidak mengalami perubahan (dianggap konstan), dalam kaitan proyeksi nilai pertumbuhan mudharabah sebagai fungsi estimasi dimasa datang maka hal ini akan mampu meningkatkan nilai pembiayaan mudharabah bank Syariah di Indonesia sebesar Rp. 1.132,657. Dengan nilai uji T (7.721) yang lebih besar besar nilai T tabel (0.741) maka dapat dikatakan pengaruhnya signifikan

### 5.2.1.1 Pengujian terhadap Model Persamaan Regresi

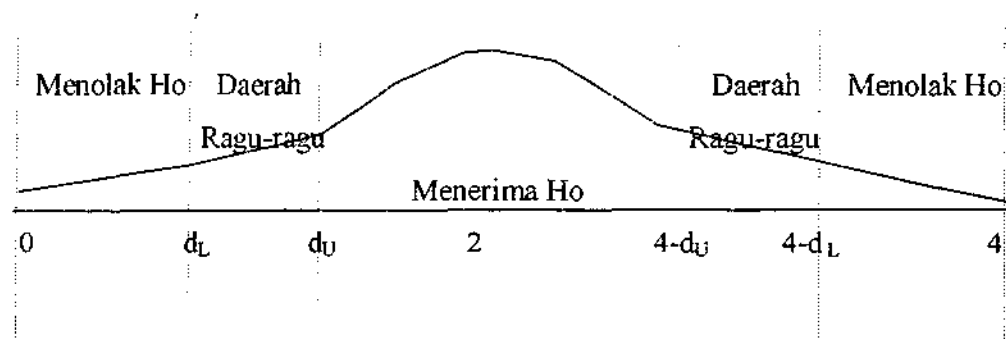
#### A. Tidak terjadinya gejala Autokolrelasi

##### ☉ Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross-sectional*). Atau dengan kata lain autokorelasi diartikan sebagai kondisi yang berurutan dinatara gangguan atau disturbansi  $U_i$  yang masuk kedalam fungsi regresi populasi (Gujarati, 1997: 201)

Akibat adanya autokorelasi ini yang paling penting adalah : (1) Selang keyakinan menjadi lebar secara tidak efisien dan pengujian signifikansi kurang kuat. (2) Varians individual akan menaksir terlalu rendah dan underestimate, (3) pengujian arti (Uji t dan Uji F) yang biasa tidak lagi sah jika diteapkan dan dampaknya akan memberikan kesimpulan yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dan koefisien regresi yang ditaksir. Petunjuk untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat dilihat salah satunya adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Gambar 5.6  
Durbin Watson



Tabel diatas menunjukkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil mengenai ada tidaknya autokorelasi pada hasil estimasi model regresi linear berganda.

Tabel 5.11

Tabel Klasifikasi Nilai DURBIN-WATSON

No	Nilai Durbin Watson Berdasarkan Estimasi Model Regresi	Keterangan
1	$(4-DW_L) < DW < 4$	Tolak null hipotesis , terdapat serial autokorelasi
2	$(4-DW_U) < DW < (4-DW_L)$	Tidak ada kesimpulan
3	$DW_U < DW < 2$	Terima null hipotesis Tidak Ada Otokorelasi
4	$DW_L < DW < DW_U$	Tidak ada kesimpulan
5	$0 < DW < DW_L$	Tolak null hipotesis , terdapat serial autokorelasi

Dari Uji Durbin Watson ( $d$ ) Pada persamaan pertama (Murabahah) diatas diperoleh bahwa DW dengan tingkat keyakinan 5 %,  $k = 4$  dan jumlah observasi ( $N$ ) sebanyak 30 adalah sebesar 1.300 sedangkan nilai  $dl = 1,14$  dan  $du = 1,74$ . Nilai yang diperoleh terletak diantara  $dl$  dan  $du$  pada , jadi terletak pada kesimpulan keempat yaitu tidak dapat diketahui secara pasti ada/ tidaknya otokorelasi dalam persamaan tersebut. Dari persamaan kedua (Mudharabah) dapat di atas diperoleh bahwa DW dengan tingkat keyakinan 5 %,  $k = 4$  dan jumlah observasi ( $N$ ) sebanyak 30 adalah sebesar 1.175 maka dapat disimpulkan untuk persamaan kedua (mudharabah) terkena gangguan autokorelasi, karena terletak pada daerah ke-4 sehingga dalam hal ini memerlukan tindakan perbaikan, agar model tidak bias dalam analisisnya.

Kesimpulan pertama ini sesungguhnya sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk menarik kesimpulan karena model dalam hal ini sudah cukup dapat dinyatakan sebagai model yang baik. Karena masih berada dalam kuadran keempat. Namun agar dapat lebih memastikannya dalam hal ini peneliti tetap memperbaikinya, dan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan ini adalah metode, dari tindakan perbaikan terdapat model regresi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 5.12**  
**Ringkasan Hasil Perhitungan Statistik setelah dilakukan tindakan perbaikan (Chocran dan Orcutt)**

Keterangan	Murabahah	Mudharabah
R Multiple	0.985	0.940
R Square	0.970	0.883
Adj. R. Square	0.963	0.858
SE. Of Estimate	68556.197	17535.367
Durbin Watson	1.914	1.418065
F Ratio	517.1899826	61.13132752

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa secara simultan keempat variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi/ pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai  $R^2 = 0,970$  untuk persamaan pertama (Murabahah) dan  $R^2 = 0,883$  untuk mudharabah. Hal ini dapat diartikan bahwa keempat variabel bebas dari persamaan ke-1 dan ke-2 secara simultan (bersama-sama) mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan pembiayaan murabahah dan mudharabah masing-masing sebesar 97 % dan 88,3%, sedangkan selebihnya masing-masing sebesar 3 % dan 11, 7 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar model. Sedangkan korelasi simultan dari masing-masing variabel bebas dari kedua persamaan terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dengan nilai R , masing-masing adalah sebesar 0.985 (99,55%) untuk murabahah dan 0.940 (94,5%) hal ini berarti bahwa untuk mudharabah. yang berarti bahwa tingkat korelasi secara keseluruhan variabel bebas cukup tinggi terhadap variabel terikatnya yaitu mendekati satu (1).

Kemudian untuk menguji signifikansi dari pengaruh secara simultan tersebut dapat dilihat dari uji statistik F, Dari perhitungan SPSS diperoleh bahwa  $F_{hitung}$  adalah sebesar 517.189 untuk murabahah dan 517.189 untuk mudharabah sedangkan  $F_{tabel}$  adalah sebesar 3.84 pada alfa = 5 %, dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sehingga pengaruh simultan ke 4 variabel bebas terhadap pertumbuhan mudharabah dan murabahah adalah signifikan.

**Persamaan pertama (Murabahah)**

**Tabel 5.13**  
**Ringkasan Koefisien Regresi, T hitung dan Sig T**  
**Persamaan fungsi kedua variabel terikat (Murabahah)**  
**Setelah dilakukan tindakan perbaikan**

Variabel	Koefisien Reg	T hitung	Sig. T
Constanta	-2361576.17	-2.679	0.000
DPK	0.72073	12.805	0.000
INFLASI	-9575.88	-0.6940	0.495
Swbi	150891.212	0.023	0.981240
Inver	228.2501	2.582	0.01338

Selanjutnya persamaan regresi sebagaimana dijelaskan pada bab IV, maka model persamaan garis regresi tersebut akan nampak sebagai berikut :

$$\text{Mrb} = -2361576.17 + 0.72073 \text{ DPK} - 9575.88 \text{ INFL} + 150891.212 \text{ Swbi} + 228.2501 \text{ Inver}$$

1. Nilai Konstanta Sebesar -2361576.17 berarti bahwa apabila keseluruhan variabel bebas tersebut mengalami perubahan sebesar nol (dianggap konstan), dalam kaitan proyeksi nilai pertumbuhan murabahah sebagai fungsi estimasi dimasa datang maka hal ini akan mampu menurunkan nilai pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia sebesar Rp. 2.361.576,17. Nilai pengaruh konstanta secara individu adalah signifikan ini dibuktikan dengan nilai t hitung > dari t tabel yang hanya sebesar 0.741.
2. Nilai koefisien untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.72073, berarti peningkatan 1 satuan Dana Pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah di Indonesia akan memberikan sumbangan terhadap meningkatnya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah sebesar Rp 0.720, atau dengan kata lain setiap 1 Rupiah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank syariah di Indonesia maka akan disalurkan 72 %-nya pada pembiayaan murabahah. Dan pengaruh ini sangat signifikan terbukti berdasarkan nilai sig. T nya (0.000), dan juga nilai dalam T hitungnya (12.805) yang lebih besar dari pada T tabel (0.741).

3. Nilai koefisien inflasi sebesar  $-9575.88$  berarti hal ini dapat diartikan bahwa Meningkatnya inflasi satu persen tiap bulannya akan mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan murabahah oleh bank syariah di Indonesia sebesar Rp. 9575,88. Namun secara individual pengaruhnya tidak signifikan ini dibuktikan dari besarnya T tabel (0.74) yang lebih besar dari T hitungnya (0.64), pengaruh ini tidak signifikan.
4. Pertumbuhan tingkat suku bunga kredit investasi bank Konvensional cukup besar pula pengaruhnya pada pertumbuhan pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien variabel kredit Investasi bank Konvensional sebesar 150891.212 Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan sebesar 1% saja tingkat bunga kredit Investasi bank konvensional maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar Rp. 73.971,906. Kondisi ini dapat dimaklumi karena dengan meningkatnya tingkat bunga pada kredit Investasi Bank Konvensional akan mengakibatkan nasabah mencari alternatif pembiayaan lain yang lebih menguntungkan dari segi cost. Dan secara individual pengaruh variabel ini cukup signifikan karena nilai T hitung (2.582) lebih besar dari pada T tabel (0.741). Atau dapat juga dianalisis dari segi posisi produk ini terhadap pasar, yaitu semakin memiliki nilai sebagai salah satu alternatif bagi pengguna jasa untuk membiayai pembeliannya dalam *scheme* ini.
5. Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), mempunyai kontribusi yaitu mampu meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar 228.25014, namun secara individual pengaruhnya dapat dikatakan tidak signifikan karena besarnya T hitung (0.023) yang kurang dari T tabel (0.741) hal ini terjadi akibat tidak adanya rate, serta tren yang pasti sebagaimana yang terjadi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang salah satu penetapannya berdasarkan tingkat suku bunga pasar. Sedangkan pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak berlaku adanya tren, serta rate yang pasti mengingat diharamkannya riba dalam sistem

Syariah. Dan imbalan yang diberikan dalam SWBI ini disebut sebagai **Bonus** dari bank sentral yang tidak diukur berdasarkan tren tertentu, atau merupakan pemberian secara sukarela dari bank Sentral.

**Persamaan Kedua :**

**Tabel 5.14**  
**Ringkasan Koefisien Regresi, T hitung dan Sig T**  
**Persamaan fungsi kedua variabel terikat (Mudharabah)**

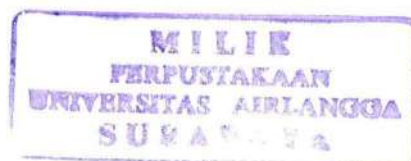
Variabel	Koefisien Reg	T hitung	Sig. T
Constanta	1310094.616	8.111	0.000
DPK	0.07458	9.172	0.014
INFLASI	9810.15761	2.637	0.008
Swbi	6563.56	2.903	0.000
Wkcr	-64614.167	-5.864	0.000

Selanjutnya persamaan regresi sebagaimana dijelaskan pada bab IV, maka model persamaan garis regresi tersebut akan nampak sebagai berikut :

$$\text{Mdb} = 1310094.616 + 0.07458 \text{ DPK} + 9810.15761 \text{ INFL} + 6563.56 \text{ Swbi} - 64614.167 \text{ Wkcr}$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Nilai Konstanta Sebesar 1310094.616 berarti bahwa apabila keseluruhan variabel bebas tersebut tidak mengalami perubahan atau sebesar nol, dalam kaitan proyeksi nilai pertumbuhan mudharabah sebagai fungsi estimasi dimasa datang maka hal ini akan mampu menurunkan nilai pembiayaan mudharabah bank Syariah di Indonesia sebesar Rp.1.310.094,616. Dalam hal ini pengaruh variabel secara individual dianggap signifikan mengingat besarnya T hitung (8.111) yang lebih besar dari T tabel (0.741).
- 2 Nilai koefisien untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.07458, berarti setiap peningkatan 1 Rupiah Dana Pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia akan memberikan sumbangan terhadap meningkatnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah sebesar Rp 0.07458, atau dengan kata lain selama periode observasi setiap terjadi penambahan sebesar Rp. 1 terhadap Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka, hanya 7,54% nya saja yang dialokasikan



pada pembiayaan mudharabah, Dalam hal ini pengaruh variabel secara individual dianggap signifikan mengingat besarnya T hitung (9.173) yang lebih besar dari T tabel (0.741).

- 3 Nilai koefisien inflasi sebesar 9810.15761 berarti hal ini dapat diartikan bahwa Meningkatnya inflasi satu persen pada bulan yang sama akan mengakibatkan meningkatnya penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank Syariah sebesar Rp. 9810,157, hal ini dapat dipahami karena dapat dimungkinkan terjadinya hal-hal dibawah ini: (1) biasanya dampak dari inflasi tersebut tidak langsung dapat dirasakan pada periode itu juga namun dalam hal ini terdapat time lag apalagi kontrak-kontrak dalam mudharabah juga memerlukan waktu dari penghitungan sampai dengan pelaksanaannya (2) Terjadinya inflasi dalam hal ini akan menguntungkan debitur karena dalam mudharabah nisbah bagi hasil ditetapkan hanya berupa prosentase dari keuntungan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang saja dan belum ada kepastian tentang jumlah yang akan dibayarkan pada bank, apabila dengan menggunakan suku bunga maka debitur sudah langsung dapat mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan setiap periodenya, hal ini akan membebani debitur jika jumlahnya besar dan kondisi ekonomi semakin buruk. Dari sisi ini merugikan bank sebagai kreditur karena hutang yang dibayarkan akan tetap sedangkan nilai uang semakin merosot, jadi disinilah letak keuntungan *win-win* solution dalam usaha berbasis syariah tidak merugikan bank dan juga tidak merugikan pengusaha (3) Kondisi share mudharabah yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah menyebabkan terjadinya inflasi meskipun signifikan berpengaruh namun hal ini tidak dirasakan gejolaknya terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah ini. (4) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori diatas inflasi menyebabkan adanya penurunan nilai riil uang, yang secara sederhana dapat diartikan dengan nilai uang yang sama pada kondisi sebelum terjadinya inflasi semakin sedikit jumlah barang yang mampu terbeli serta biaya-biaya lain yang tercover khususnya dalam pembiayaan dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini pengaruh variabel



- secara individual dianggap signifikan mengingat besarnya T hitung (2.637) yang lebih besar dari T tabel (0.741).
- 4 Pertumbuhan tingkat suku bunga kredit modal kerja bank Konvensional sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan mudharabah. Pengaruhnya pada pertumbuhan pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien variabel kredit Modal kerja bank Konvensional sebesar -64614.167 Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan sebesar 1 % saja tingkat bunga kredit modal kerja bank konvensional maka akan menurunkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar Rp. - 64614,167, Atau dengan kata lain menurunnya tingkat bunga kredit modal kerja pada bank konvensional akan mengakibatkan meningkatnya pula jumlah pembiayaan pada mudharabah bank syariah, hal ini dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut: (1) Share mudharabah yang masih sangat kecil terhadap kredit modal kerja nasional mengakibatkan mudharabah masih kurang di perhitungkan oleh calon debitur. (2) Pangsa kredit yang masih terbatas dan sangat kecil jumlahnya mengakibatkan tren nisbah bagi hasil yang ditetapkan masih sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional sehingga calon debitur menganggap pembiayaan mudharabah sama saja dengan bunga (3) No 2 dan ditambah dengan kurangnya pengetahuan nasabah tentang sistem yang dijalankan oleh bank syariah menyebabkan pertumbuhan mudharabah sementara ini masih menjadi "*market taker*" dalam pengembangan produk pembiayaan, dan masih belum mampu menggarap "*pangsa potensialnya*" sendiri , sehingga perilakunya secara statistik justru berlawanan dari harapan teori. Dalam hal ini pengaruh variabel secara individual dianggap signifikan mengingat besarnya T hitung (5.864) yang lebih besar dari T tabel (0.741).
- 5 Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah, mempunyai kontribusi yaitu mampu meningkatkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar Rp.6563,56, Dalam hal ini pengaruh variabel secara individual

dianggap signifikan mengingat besarnya  $T$  hitung (2.903) yang lebih besar dari  $T$  tabel (0.741) hal ini dapat terjadi karena, (1) tingkat pembiayaan mudharabah yang masih kecil *sharenya* terhadap total pembiayaan yang dilakukan jika dibandingkan tingkat murabahah hal ini juga terjadi akibat tidak adanya rate, serta tren suku bunga yang pasti sebagaimana yang terjadi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), (2) walaupun tidak menentu tingkat "bonusnya", namun hasil yang didapatkan dari penempatan portofolio (*iddle fund*) ini cukup menarik dan dapat diperhitungkan, termasuk faktor resiko yang harus diperhitungkan dalam setiap penempatan dana oleh perbankan. (3) Mengingat terdapatnya *pool of fund* dalam mekanisme pengelolaan dana yang akan disalurkan pada pembiayaan hal ini dapat juga diartikan bahwa setiap Rp. 1 penempatan pada SWBI maka pendapatan yang diterima oleh bank syariah dari hasil tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk menambah besarnya modal yang disalurkan pada pembiayaan mudharabah mengingat besarnya pangsa pembiayaan mudharabah terhadap murabahah yang masih kecil dibandingkan murabahah terhadap total pembiayaan yang rata-rata pada seluruh Bank syariah di Indonesia mencapai kisaran 60 %- 80%.

#### **B. Tidak terjadinya gejala Multikolinearitas**

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi atau munculnya kolinearitas ganda disebabkan oleh satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya. Akibat adanya multikolinieritas ini akan sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikatnya.

Untuk mengetahui ada tidaknya kolinieritas berganda dalam suatu model regresi linier berganda dapat dilihat dari nilai koefisien Person Correlation dalam sebuah tes dalam hal ini dari hasil tes Person Correlation yang dilakukan tidak terdapat nilai koefisien yang melebihi 0.5, berarti dalam hal ini tidak terdapat multikolinearitas antara variabel-variabel bebasnya.

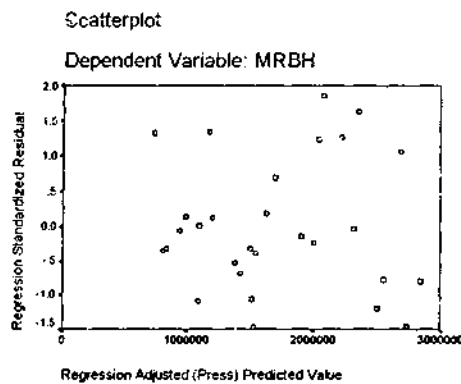
### C. Heteroskedastisitas

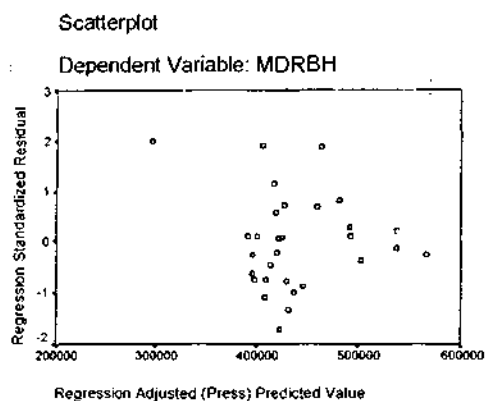
Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pengujian ada tidaknya problem heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, antara lain : 1) Sifat Dasar Alamiah, 2) Metode Grafik, 3) Uji Koefisien Korelasi Spearman, 4). Uji Park dan 5). Uji Glesjer.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan uji korelasi rank spearman dan dengan menggunakan grafik untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam pengujian ini.

Dalam pengujian ini diperoleh koefisien korelasi spearman yang keseluruhannya nilainya lebih kurang dari 0.50 (50%). Sehingga hal ini mengindikasikan tidak terdapatnya heteroskedastisitas dalam model yang disusun tersebut.

Demikian pula dengan grafik residual standar yang tersusun dalam model sebagai berikut menunjukkan tidak terdapatnya pola yang beraturan dari residual standarnya, sehingga dengan sangat meyakinkan dapat dinyatakan tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam model yang diajukan.





### Pembuktian hipotesis

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel-variabel yang diajukan dalam kedua model persamaan tersebut berpengaruh secara simultan dan serta signifikan adalah terbukti, dengan nilai uji F yang lebih besar dari nilai F tabelnya.
2. Hipotesis ke dua yang menyatakan bahwa variable SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah dan mudharabah tidak terbukti pada pembiayaan mudharabah, karena pertumbuhan tingkat SWBI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah, dan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan murabahah.

#### 5.2.2 Observasi kondisi Internal

Observasi ini dilakukan pada 2 buah bank besar dengan menggunakan metode purposive sampling maka dalam hal ini dari populasi 7 bank syariah yang telah ada sample diambil berdasarkan kategori bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha yang didalamnya termasuk mudharabah dan murabahah minimal selama 2 Tahun agar didapatkan hasil yang maksimal. Dan berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini dipilih, Bank Muamalat Indonesia serta Bank Negara Indonesia 46 (BNI '46) Unit Usaha Syariah diambil sebagai sample. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan

observasi terhadap data-data yang dimiliki pada masing-masing bank maka diperoleh hasil sebagai berikut, yang disajikan dalam bentuk perbandingan :

## **BNI UUS**

### **1. Prosedur Pembiayaan**

BNI menyatakan dalam memberikan persyaratan aplikasi kepada nasabah pembiayaan responden menganggap bahwa prosedur yang diberikan dirasa sudah cukup mudah. Karena prosedur yang standar baik secara administratif maupun pengelolaan, yang dilaksanakan pada BNI unit syariah sama dengan prosedur standar pada BNI konvensional yang sudah berjalan dan berhasil.

**Dalam hal ini Aplikasi murabahah, dibagi dalam 2 kelompok berdasarkan sifat pembiayaan :**

#### **Pembiayaan bersifat Produktif ;**

Nasabah cukup mengajukan aplikasi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tidak perlu menggunakan proposal, dan jaminan.

Proses analisis dilakukan maksimal 14 hari, dan dilakukan survey kondisi riil oleh pihak bank dan dalam sistem terdapat tim khusus penentu pembiayaan dan kemudian diputuskan apakah usaha dibiayai ataukah tidak.

Dalam pembiayaan Murabahah Bank tidak bertindak sebagai penjual sebagaimana dalam dasar hukum prinsip syariah, namun tetap bertindak sebagai penjual secara tidak langsung dengan menunjuk seorang supplier/ wakalah, serta jaminan yang diberikan oleh nasabah berupa barang yang dibeli tersebut.

#### **Pemb. Konsumtif**

Dianalisa +/- 7 hari atau satu minggu (tidak menggunakan jaminan), Perbedaan penerapan pembiayaan syariah dan konvensional adalah (bila dalam bank konvensional ditetapkan dengan bunga), dalam bank syariah dilakukan penerapan margin yang telah ditentukan berdasarkan standar bank BNI Syariah sendiri yaitu :

RPRR, Memperkirakan : *Branch mark* mengacu pada Biaya Overhead.

Margin , ditentukan dan tidak berubah-ubah seperti bank konvensional, disepakati antar kedua belah pihak.

## 2. Pengelolaan Pasca Pembiayaan Mudharabah

Pada Unit Usaha syariah Bank Negara Indonesia (BNI) terdapat kebijakan

- (1) Review/ Evaluasi Pembiayaan produktif / tahun, kondisi usaha nasabah dan dilakukan biasanya 6 bulan sekali, dengan cara survey oleh pihak bank
- (2) Dalam hal ini bank dapat membuat perjanjian, kesepakatannya dimana bank memiliki kewenangan untuk memeriksa dana yang dikelola oleh nasabah.

Pengelolaan pasca pembiayaan sangat tergantung pada kebijakan bank masing-masing mempunyai kebijakan tersendiri dalam menerapkan prinsip prudential banking,

### BMI

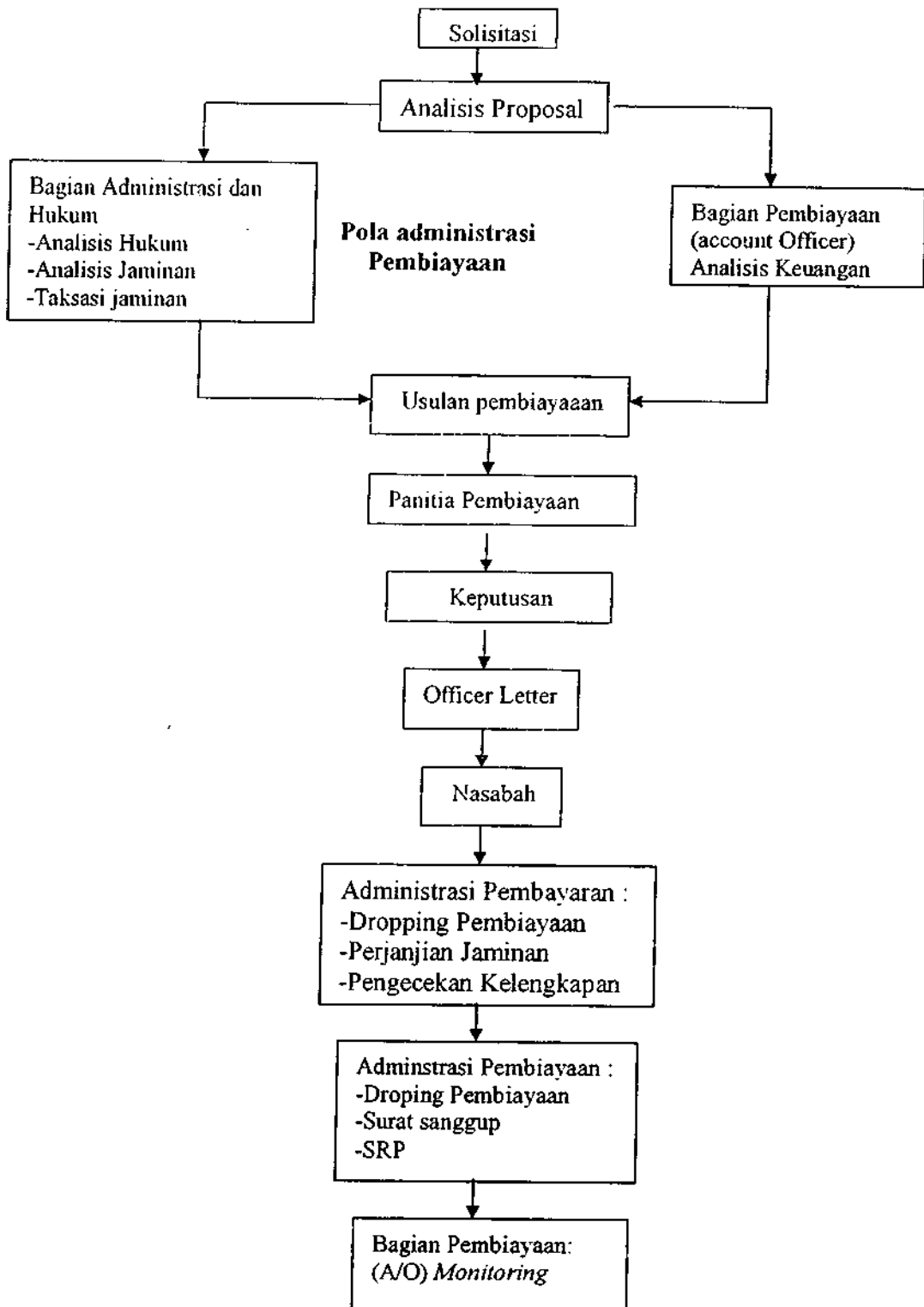
Sedangkan pada BMI pembiayaan baik Mudharabah maupun Murabahah dikelompokkan secara umum berdasarkan prosedur administratif serta Subyek yang melakukan transaksi dengan bank yaitu ; (1) Perseorangan, (2) Korporasi

Secara administratif syarat pembiayaan mudharabah yang diajukan relatif mudah, pada dasarnya hampir sama dengan BNI syariah , hanya perlu mempergunakan proposal dan laporan keuangan bagi kredit yang bersifat produktif khususnya baik individu maupun corpoaasi. Selanjutnya setelah dilakukannya permohonan oleh nasabah dengan menggunakan poposal adalah sebagai berikut :

dalam hal ini AO (Account Officer) kemudian berhak untuk menentukan bahwa korporasi/ perorangan tersebut yang dapat dibiayai melalui *scheme* pembiayaan yang dinilai layak untuk calon debitur dan sebagainya, pengelolaan selanjutnya antara murabahah dan mudharabah jelas sangat dibedakan.

### I. Mudharabah

Gambar berikut menunjukkan prosedur pengelolaan pembiayaan mudharabah oleh BMI



## II. MURABAHAH

Menggunakan jaminan berupa surat-surat atau kelengkapan obyek murabahah tersebut seperti misalnya pembiayaan pembelian rumah untuk perorangan maka yang dijadikan jaminan adalah SHGB, IMB, PBB tahun terakhir, serta denah / lokasi rumah yang akan dibeli/ dijaminkan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BMI hanya sebesar maksimal 70% dari total harga pembelian barang. Dengan plafon pembiayaan minimum sebesar Rp. 50 juta. Hal ini dikarenakan Biaya operasional akan menjadi lebih besar jika plafon pembiayaan tidak dibatasi sampai batas minimum pinjaman yang ditentukan, akibatnya akan menjadi tidak efisien, disisi lain ini berkaitan dengan target segmentasi pasar BMI, dan memberikan kesempatan hidup bagi pengusaha LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah; BMT dan BPRS) yang merupakan binan dari BMI, melalui Baitulmaal Muamalat.

### 3. Tren pembiayaan murabahah dan mudharabah

#### BNI UUS

Tren pertumbuhan pembiayaan membaik baik pembiayaan mudharabah maupun murabahah sama-sama meningkat dengan indikasi ini :

1. Capem bertambah (pada tahun ke-3 ini) dari hanya 5 buah menjadi 12 capem pada 2003 dan tahun 2003 ini pula bertambah 1 capem lagi pertumbuhan pesat dalam 2 tahun.
2. Pembiayaan terjadi pada 2002 s/d 2003 yaitu pertumbuhannya mencapai kurang lebih 100%. Diharapkan kondisi serta, pertumbuhan ekonomi yang membaik dapat meningkatkan iklim usaha masyarakat dan prospek pembiayaan menjadi semakin baik dimasa depan.
3. Pembiayaan Syariah meningkat 93,72% pada akhir 2002, mencapai Rp. 292,9 M dari 151,2 M di tahun 2001. Dari total Dana pihak ketiga yang dikelola oleh BNI syariah yaitu sebesar (Giro wadiah; 2001, 34,1 M dan 2002, 31,1 M; Tabungan mudharabah; 2001, 52,3 M dan 2002; 113,9 M, Deposito mudharabah (2001:2,6 M dan 2002 M 60 M ), DPK ini memang masih tergolong kecil, namun jika dibandingkan dengan total pembiayaan



baik murabahah dan mudharabah yang dilakukan tergolong sangat besar, bahkan lebih besar dari DPKnya, hal ini mengindiasikan modal ikut pula diputar untuk melakukan pembiayaan.

#### **BMI**

1. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank mumalat (Disampaikan terlampir)
  
4. **Kendala-kendala yang berpengaruh pengelolaan pembiayaan, Mudharabah dan Murabahah, adalah sebagai berikut:**
  - a. **SDM Pegawai bank sendiri**
  - b. **Penerima pembiayaan (Non Performing Loan)**
  - c. **Sistem / manajemen pengelolaan pembiayaan tersebut**

#### **BNI UUS**

Kendala yang dihadapi antara lain :

- a) **SDM** , yaitu kultur konvensional dan syariah yang berbeda, hal ini sangat berpengaruh pada iklim serta kinerja karena karyawan BNI syariah adalah karyawan BNI Konvensional pada divisi syariah (BNI syariah) yang dari sisi legalitasnya tidak berbeda, adanya UU no 1998, tentang dual banking system melegalkan manajemen serta SDMnya juga sama. Karyawan BNI syariah adalah juga karyawan dari BNI konvensional, budaya karyawan BNI yang pasif karena keberadaan BNI yang sudah dikenal luas, maka secara otomatis BNI UUS juga sudah dianggap dikenal luas serta mempunyai pasar tersendiri, sedangkan prinsip syariah disadari merupakan prinsip yang sama sekali berbeda dengan prinsip konvensional sehingga pertumbuhan divisi syariah (SDM) ini belum seperti apa yang diharapkan.
- b) Dalam pengelolaan sistem operasionalnya berbeda dan pengelolaan dananya dipisahkan secara akuntansi hanya saja untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah ATM BNI syariah online pada ATM konvensional. Pembinaan lebih menekankan pada perubahan budaya kerja

- c) Masalah bunga yang sudah biasa diterapkan (*interest minded*) Belum adanya syariah minded
- d) Pola pada pembinaan BNI dari sisi skill system pelatihan adalah melalui mekanisme *Learning by doing* dengan memandang syariah tetap sebagai acuan sedangkan lembaga bisnis tetap lembaga bisnis sehingga harus dapat seimbang (dengan Panduan Dewan Syariah Nasional)
- e) NPL, Risk merupakan factor biasa, kurang dari 5 % dalam kisaran 2% s/d 4 % kurang lebih
- f) Belum tersosialisasikannya prinsip-prinsip/ akad-akad syariah (Pemecahannya) tergabung dalam MES, Asbisindo, melakukan sosialisasi baik secara individu maupun kelompok.
- g) Sudah ada prosedur standar yang merupakan bagian dari BNI'46 konvensional.  
Belum tersosialisasikannya prinsip-prinsip/ akad-akad syariah (Pemecahannya) tergabung dalam MES, ASBISINDO, MELAKUKAN Sosialisasi baik secara individu maupun kelompok. Kendala pada cost, untuk promosi yang cukup tinggi
- h) Eksternal, Kendala lebih mengacu pada perangkat hukum dan perundangan yang tidak terakomodasi; BI, pajak misal adanya isu bahwa transaksi di bank syariah bukan termasuk transaksi perbankan sehingga murabahah dikenakan pajak dan sebagainya yang kedua adalah masalah meragukan keabsahan kontrak, sebagai contoh kasus dalam kontrak murabahah:
  1. Murabahah Bank melakukan perintah dan membayar ke supplier untuk nasabah/ sesuai permintaan nasabah.
  2. Murabahah dan Wakalah dimana bank memberikan dana kepada nasabah dan menunjuk agen/ supplier perwakilan yang dipercaya oleh bank
  3. Faktor-faktor teknis pada murabahah - penyesuaian, tidak ada standar, sehingga terkesan bergerak dengan sendirinya, serta kurangnya sosialisasi.

**BMI**

- a) Dari SDM karyawan BMI dinilai banyak yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan BMI, namun mengingat banyaknya pembukaan cabang dan setiap cabang diberikan hak otonom untuk merekrut karyawan operasional maka belum semuanya memenuhi standard
- b) Hukum dan perundang-undangan adalah kendala utama dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis perbankan syariah ini
- c) Masih diperlukan banyak lagi penyempurnaan system dalam intern pengelolaan pembiayaan, agar lebih sempurna serta lebih banyak memberikan kemudahna bagi nasabah.
- d) Promosi harus lebih digalakkan karena dinilai masih kurang.

**4. Pembiayaan murabahah jika dibandingkan scheme pembiayaan yang lain**

**BNI UUS**

1. Nasabah selama ini lebih suka melakukan pengajuan kredit melalui *shceme* murabahah daripada mudharabah
2. Ada keenganan dikalangan nasabah untuk dipantau secara mendalam oleh bank dalam managerial usahanya, karena praktek ini adalah hal baru yang dijalankan oleh perbankan
3. Potensi moral hazard dan *lose* yang tinggi

**BMI**

Hal ini dikarenakan :

- 1 Kinerja AO (*Account Officer*), menjadi lebih banyak rumit dalam memaintain financing AM (*Account Manager*) bekerja dengan target, sehingga belum ada kesiapan untuk melakukan maintain, namun akan selalu dilakukan perbaikan.
- 2 Pengawasan lebih rumit, dan nasabah juga masih mengalami kesulitan untuk melaksanakan sistem pengawasan, dan mematuhinya oleh bank.

- 3 Masih banyak nasabah yang kurang mengerti tentang administrasi dan kesulitan dalam membuat pelaporan.
- 4 Masih tingginya kekhawatiran akan tingginya *moral hazard* pada industri perbankan
- 5 Kecuali dalam mudharabah muqayyadah dimana bank hanya bertindak sebagai perantara/ intermediasi dan menjalankan fungsi analisa bisnis/ kelayakan usaha dari pihak yang proyek yang akan dibiayai dalam pembiayaan tersebut.

**6. Peluang di sektor yang saat ini sudah dan belum mampu dijangkau oleh ins m/Uansi melalui skim mudharabah maupun murabahah**

**BNI UUS**

Dalam mudharabah jika bank-bank syariah lain lebih selektif maka dalam hal ini bank BNI Syariah paling berani bermain pada pembiayaan banyak sektor usaha dalam memasukkan pembiayaan mudharabah:

- Perdagangan
- Agribisnis
- Konstruksi (skala kecil) al; SPK (sector property kecil)
- Perhotelan Syariah

Sektor lain jugamasih sedang dipelajari namun pengembangan pembiayaan ini sangat tergantung atau terbentur pada masalah cost (biaya). Sebagian dari sektor yang dipilih untuk dibiayai tersebut adalah sektor menengah kecil.

**BMI**

Disetiap tahun jenis sektor yang dimasuki oleh pembiayaan produktif dan konsumtif BMI berbeda-beda tergantung dari banyak faktor seperti iklim bisnis dan investasi, misalkan tahun ini, pembiayaan produktif hanya diperuntukkan bagi usaha-usaha tertentu kecuali sektor industri kimia, properti dan sebagainya. Pada sisi pembiayaan murabahah tidak secara umum dibatasi (misal tahun 2003) hanya pada pembiayaan pada barang seperti; pembelian sepeda motor, renovasi rumah dan pembelian rumah saja, namun untuk pembelian barang-barang lain masih memungkinkan dilakukan pembiayaan dan hal ini tidak diklasifikasikan secara



jenis barang apa saja yang akan mendapat pembiayaan, namun analisa dilakukan kemudian setelah nasabah mengajukan aplikasi pembiayaan terhadap barang yang akan dibelinya tersebut pada Bank Muamalat.

**7. Kendala/ peluang yang dihadapi bank menyangkut faktor terhadap agama pada pengoperasian bank syariah**

**BNI UUS**

- a. Berdasarkan Internal BNI Syariah adalah divisi atau salah satu bagian dari bank umum/ tidak ada indoktrinasi pada karyawan BNI Syariah
- b. Tidak identik dengan Islam saja melainkan menurut *entity* bisnis dan tidak hanya dengan pendekatan religi saja tetapi lebih pada bisnis; sebagai contoh dalam peluncuran total produk pembiayaan BNI syariah, telah mengucurkan dana ke nasabah dengan porsi 30 % dari nasabahnya merupakan nasabah nonmuslim.

**BMI**

Dalam hal ini BMI beranggapan akan sangat dipengaruhi oleh faktor sentimen terhadap agama karena market dan salah satu slogan dan tujuan BMI adalah “Dominan di Pasar Emosional serta dikagumi di Pasar Rasional”. Pelayanan kepada nasabah non muslim juga diberikan sejauh ini faktor sentimen terhadap agama tidak pernah menjadi kendala justru menjadikannya sebagai suatu peluang.

**8. Penentuan Nisbah bagi hasil pembiayaan Bank Syariah**

**BNI UUS**

Kerugian ditanggung bank kecuali jika seandainya terjadi: kelalaian dari pihak manajemen seperti tidak amanah dsb. Penentuan nisbah berdasarkan acuan *Require Profit Rate* sehingga setiap nasabahnya satu bisa berbeda dengan nasabahnya lainnya dalam penentuan nisbah keuntungan yang dalam hal ini tidak diatur didalam fiqih.

**Murabahah** tingkat keuntungan ditetapkan Fix, diawal, sedangkan konvensional tidak.

**Mudharabah** - Lebih pada opportunity - tergantung pada nilai Proyek yang diukur berdasarkan patokan bank ( RPR (*Require Profit Rate*) ) yang diproyeksikan pada biaya yang ditanggung bank. Tetapi pada penentuan nisbah untuk nasabah deposito pada BNI syariah baik 1/ 3/ 6 bulan akan sangat ditentukan dari hasil usaha pada masing-masing cabang dengan kata lain pada masing-masing cabang akan sangat berbeda-beda dan beragam, tergantung pendapatan usahanya.

SWBI adalah salah satu alternatif untuk mengatasi idle fund pada cabang namun marginnya tidak begitu baik.

### **BMI**

Niah pada BMI ditentukan secara terkomando dari pusat dan ditentukan berdasarkan rumus  $H_i / M_i$ . dengan memperhatikan aset serta liabilitas perbankan. Setiap cabang tidak diberikan hak untuk mengatur sendiri berapa besarnya bagi hasil berdasarkan jumlah pendapatan cabang tersebut.

## **9. Pengaruh faktor agama terhadap perluasan cabang**

### **BNI UUS**

Budaya masyarakat setempat tidak menjadi permasalahan utama dalam kerangka pendekatan faktor bisnis namun kendala utamanya adalah pensosialisasian yang belum banyak dilakukan terutama di daerah.

### **BMI**

Faktor religius benar namun dalam hal ini, perilaku market serta potensi market di daerah tersebut juga menjadi bahan pertimbangan utama bagi bank untuk menentukan dibuka atau tidaknya kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.

### 5.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil kedua pendekatan penelitian diatas sudah dapat diketahui beberapa pokok penting permasalahan pada pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank syariah, variabel-variabel eksternal yang diajukan telah terbukti memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan kedua pembiayaan tersebut secara nasional.

#### Koefisien

Nilai Koefisien pada persamaan pertama (murabahah) bernilai negatif dapat diartikan, jika keseluruhan variabel bebas tersebut mengalami perubahan sebesar nol (dianggap konstan), dalam kaitan proyeksi nilai pertumbuhan murabahah sebagai fungsi estimasi dimasa datang maka hal ini akan mampu menurunkan nilai pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan pertumbuhan nilai pembiayaan murabahah nasional sangat tergantung pada variabel-variabel bebas tersebut terutama dana pihak ketiga dan tingkat bunga perbankan nasional dalam hal ini tingkat bunga kredit Investasi bank konvensional, sekaligus menunjukkan tingginya konvensional *minded* dalam menentukan tingkat keuntungan/ mark-up di bank syariah.

Sedangkan pembiayaan mudharabah justru berkoefisien positif, dapat diartikan sebagai berikut (1) Pangsa-nya yang masih rendah jika dibandingkan murabahah (2) Dalam kondisi variabel-variabel lain konstan dapat diprediksikan masih dapat mengakibatkan kenaikan dalam jumlah pembiayaan ini. Walaupun masih dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit modal kerja bank konvensional tetapi ia memiliki "ketahanan yang lebih baik" dari pada murabahah karena perbedaan yang mendasar dalam kontraknya, dibandingkan kontrak pada system bank konvensional.

#### Dana Pihak Ketiga

Dalam kasus pembiayaan Murabahah didapati kecenderungan bank syariah untuk menyalurkan scheme pembiayaan murabahah sebesar 72 % dari total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpunnya. Hal ini menunjukkan masih cukup

kuatnya pisis pembiayaan murabahah menjadi “primadona” penyeluran pinjamna ke masyarakat bagi bank syariah. Sedangkan penyaluran pembiayaan melalui *scheme* hanya dialokasikan sebesar 7 % saja dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah selama periode observasi, dan dihubungkan dengan faktor penyebabnya dari pihak internal bank syariah yang kasusnya dijadikan studi dalam penelitian ini menunjukkan; (1) masih belum adanya kesiapan dari sumber daya manusia (Account Officer), dalam melakukan pengawasan, penilaian terhadap nasabah mudharabah dan juga nasabah untuk bekerjasama dengan sistem ini, (2) tingginya faktor “trauma” perbankan terhadap adanya Moral Hazard yang dialami oleh bank konvensional, (3) serta masih rendahnya kemampuan nasabah bank syariah dalam membuat laporan keuangan dan administrasi dikarenakan kebanyakan diantara mereka adalah nasabah yang berasal dari sektor menengah kebawah. (4) Faktor resiko murabahah serta kemudahan dalam transaksi menjadikan murabahah lebih banyak dilakukan bank syariah.

### **Inflasi**

Variabel kedua, Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah secara signifikan, hal ini apabila dihubungkan dengan teori diatas dapat disimpulkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut; (1) Karena sifat transaksi murabahah adalah bank membiayai terlebih dahulu secara tunai pada nasabah terhadap barang yang akan dibeli nasabah yang ternyata dalam prakteknya tidak semua jenis barang yang terinflasi dibiayai oleh pembiayaan murabahah/ sangat bergantung pada ketentuan masing-masing bank syariah. (2) Adanya faktor-faktor internal yaitu melaksanakan prinsip kehati-hatiannya (*prudential banking*) untuk menyalurkan pembiayaan bank lebih memproteksi diri dengan aturannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh bank Muamalat dengan menentukan pembiayaan berdasarkan bidang serta pembiayaan murabahah dengan membatasi pembelian barang dan jasa tertentu, sehingga dampak inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Sebaliknya pada mudharabah tingkat inflasi mempengaruhi, bank syariah pada umumnya menghadapi permasalahan antara lain : (1) Biasanya dampak dari



inflasi tersebut tidak langsung dapat dirasakan pada periode itu juga namun dalam hal ini terdapat *time lag* apalagi kontrak-kontrak dalam mudharabah juga memerlukan waktu dari penghitungan sampai dengan pelaksanaannya. (2) Kondisi share mudharabah yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah menyebabkan terjadinya inflasi meskipun signifikan berpengaruh namun hal ini tidak dirasakan gejolaknya terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah ini. (3) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori diatas inflasi menyebabkan adanya penurunan nilai riil uang, secara sederhana dapat diartikan dengan nilai uang yang sama pada kondisi sebelum terjadinya inflasi semakin sedikit jumlah barang yang mampu terbeli serta biaya-biaya lain yang tercover khususnya dalam pembiayaan pada sebuah perusahaan, sehingga menyebabkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, (4) Share yang masih sangat rendah 12 % (2003/1) dari total pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menyebabkan mudharabah sangat rentan dengan gejolak kondisi eksternal.

#### **Suku bunga kredit investasi bank Konvensional**

Signifikan pengaruhnya pada pertumbuhan pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. ditemukan bahwa setiap terjadinya peningkatan sebesar 1% saja tingkat bunga kredit Investasi bank konvensional meningkat maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar Rp. 73.971,906. Kondisi ini dapat dimaklumi karena dengan meningkatnya tingkat bunga pada kredit Investasi Bank Konvensional akan mengakibatkan nasabah mencari alternatif pembiayaan lain yang lebih menguntungkan dari segi biayas. Dari segi posisi produk terhadap pasar, hal ini mulai dinilai sebagai salah satu alternatif bagi pengguna jasa untuk membiayai pembeliannya dalam *scheme* ini.

#### **Suku bunga kredit modal kerja bank Konvensional**

Sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan mudharabah. Ditemukan bahwa setiap terjadinya kenaikan sebesar 1 % tingkat bunga kredit

modal kerja bank konvensional maka akan menurunkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank Syariah sebesar Rp. -64.614,167, Atau dengan kata lain menurunnya tingkat bunga kredit modal kerja pada bank konvensional akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembiayaan pada mudharabah bank syariah, hal ini dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut; (1) Share mudharabah yang masih sangat kecil terhadap kredit modal kerja nasional mengakibatkan mudharabah masih kurang di perhitungkan oleh calon debitur. (2) Pangsa kredit yang masih terbatas dan sangat kecil jumlahnya mengakibatkan tren nisbah bagi hasil yang ditetapkan masih sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional sehingga calon debitur menganggap pembiayaan mudharabah sama saja dengan bunga (3) No 2 dan ditambah dengan kurangnya pengetahuan nasabah tentang sistem yang dijalankan oleh bank syariah menyebabkan pertumbuhan mudharabah sementara ini masih menjadi "market taker" dalam pengembangan produk pembiayaan, dan masih belum mampu menggarap "pangsa potensialnya" sendiri, sehingga perilakunya secara statistik justru berlawanan dari harapan teori.

#### **Sertifikat Wadiah Bank Indonesia**

Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), tidak signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah terjadi karena; (1) tidak adanya rate, serta tren yang pasti sebagaimana yang terjadi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (2) Imbalan dari SWBI diakui kurang menguntungkan dari pada disalurkan untuk menyalurkan pembiayaan melalui akad murabahah.

Sebaliknya signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah (1) tingkat pembiayaan mudharabah yang masih kecil *sharenya* terhadap total pembiayaan yang dilakukan jika dibandingkan tingkat murabahah hal ini juga terjadi akibat tidak adanya rate, serta tren suku bunga yang pasti sebagaimana yang terjadi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (2) walaupun tidak menentu tingkat "bonusnya", namun hasil yang didapatkan dari penempatan portofolio (iddle fund) ini cukup menarik dan dapat diperhitungkan, termasuk

faktor resiko yang harus diperhitungkan dalam setiap penempatan dana oleh perbankan jika dibandingkan dengan menempatkannya pada pembiayaan mudharabah.(3) Mengingat terdapatnya *pool of fund* dalam mekanisme pengelolaan dana yang akan disalurkan pada pembiayaan hal ini dapat juga diartikan bahwa setiap Rp. 1 penempatan pada SWBI maka pendapatan yang diterima oleh bank syariah dari hasil tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk menambah besarnya modal yang disalurkan pada pembiayaan mudharabah mengingat masih kecilnya pangsa pembiayaan ini jika dibandingkan

pembiayaan murabahah terhadap total pembiayaan yang rata-rata pada seluruh bank syariah di Indonesia mencapai kisaran 60 %- 80%, 70,33% pada 2003/1.

#### **Kendala keterbatasan**

Kendala keterbatasan ini menurut Bank Indonesia (2001) disebabkan oleh dua hal pertama, Tidak semua alternatif penempatan aktiva produktif yang boleh menurut ketentuan konvensional dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dan karena pasar keuangan syariah masih sangat baru maka jumlah instrumen dan pelaku pasarnya juga masih sangat terbatas.

#### **Masalah Perundangan**

Adalah masalah yang sangat *urgent* sifatnya jika dibandingkan masalah bank syariah yang lain karena diakui, bank syariah seolah berjalan sendiri tanpa adanya payung bagi terjadinya sinergisasi peran dalam perbankan di Indonesia, dalam penetapannya selama ini sangat penuh dengan nuansa tarik-menarik kepentingan, sehingga sangat ditentukan oleh kebijakan yang terjadi diatas dan kepentingan apa yang mendasarinya.

#### **Kendala dala penerapan produk Bank Syariah itu sendiri**

Mempraktekkan syariah Islam dalam dunia perbankan tidak dapat dikatakan mudah, karena pada kenyataannya banyak sekali terdapat benturan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian-penyesuaian, yang dalam penyesuaian

itu diharapkan tidak melanggar prinsip syariah (dan dalam hal inilah peranan Dewan Syariah Nasional sangat diperlukan). Dalam hal ini sebagaimana menurut Cecep M Hakim (1999: 15) terdapat kendala-kendala dalam penerapan prinsip syariah dalam aplikasinya pada produk bank syariah sebagai contohnya adalah kendala pada penerapan produk pembiayaan pada Bank syariah, sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Contoh Kendala penerapan produk Syariah dalam perbankan**

Produk Syariah	Hukum Syariah	Hukum Positif/ Perbankan	Kendala Bank Syariah jika tetap berpegang pada produk Syariah
Mudharabah Musyarakah	Dana modal tidak boleh dijamin	Dijamin (Liabilitas, deposito/tabungan). Bank boleh meminta jaminan tergantung dari resiko (Aset)	Bank harus menanggung semua kewajiban tidak berbeda dengan konvensional
Murabahah	Bank menjual pada nasabah dan tidak boleh diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang	Jika dilakukan jual beli harus ada akta jual beli. Harus ada bukti penerimaan uang oleh nasabah	Bank akan terkena pajak pembelian, Tanda terima oleh nasabah tidak bisa dijadikan bukti
Salam	Setelah dibayar petani akan mengantar gabah/ produsen mengantar produknya	Penjual berhutang uang, harus mengembalikan uang	Resiko harga gabah/ barang yang fluktuatif akan merugikan bank
Istisna	Setelah dibayar (sebagian) penjual (Nasabah) berhutang barang yang akan diantar kemudian	Penjual berhutang uang, harus mengembalikan uang	Jika barang pesanan bohir, bank berisiko tidak dibayar bila terdapat cacat pada barang
Ijarah Muntahia Bitamlik	Syariah hanya mengenal Operating Lease. Jika ada opsi beli maka itu hanya mengikat bila diadakan diakhir masa sewa (tidak boleh ada 2 akad kontrak yang dijadikan satu)	Operating Lease adalah produk perusahaan jasa, Finance dan Capital Lease adalah produk perusahaan keuangan, opsi bersifat mengikat jika dikenakan dalam perjanjian	Bank sulit mengeluarkan penyewa dari rumahnya, merugikan salah satu pihak bila opsi tidak dilaksanakan.

Sumber : Cecep M. Hakim, Bank Indonesia, 2000

Berbagai jurnal internasional berkenaan dengan hal tersebut saat ini tengah ramai ditulis dan masih dicarikan solusinya

### **Masalah Penentuan Harga**

Harga adalah factor yang paling banyak mengandung perdebatan adalah masalah penentuan harga, terutama pada produk pembiayaan. Hal ini disebabkan karena : (1) adanya faktor benchmark (rujukan) sebagai bahan perbandingan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap bank konvensional. Maka hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pengaruh yang sangat signifikan antara perubahan tingkat suku bunga baik tingkat suku bunga modal kerja maupun tingkat suku bunga investasi dengan pertumbuhan tingkat pembiayaan baik murabahah dan mudharabah.

(2) Penentuan harga juga berkaitan dengan masalah efisiensi suatu bank dalam mengelola usahanya terkait dengan biaya operasional, *cost of fund* yang ditanggung dan sebagainya.(3) Bagaimana merubah pola pemikiran *ribawi* masyarakat serta insan perbankan sendiri dalam rangka menjadikan kegiatan bank syariah menjadi “sesuai syariah “ tidaklah mudah.

### **Masalah Sumber Daya Manusia**

Masalah sumber daya manusia adalah masalah yang tidak kalah penting dalam pengembangan lembaga perbankan ini karena pendidikan yang telah dilakukan selama ini adalah pendidikan dengan sistem peninggalan penjajah yang memisahkan antara masalah agama dengan urusan dunia. Sehingga para lulusan yang menguasai keuangan Syariah ini sangatlah sedikit.

Sementara di pesantren-pesantren ilmu ekonomi syariah belum diajarkan, demikian pula dengan Institut-institut agama yang banyak tersebar diseluruh penjuru tanah air ini sangatlah sedikit dan langka yang memperkenalkan ilmu ekonomi dan keuangan syariah, hal ini membawa konsekwensi bahwa pertumbuhan perbankan syariah (yang juga masih tergolong baru di Indonesia) sangat jarang memiliki tenaga-tenaga yang kompeten serta menguasai benar masalah ekonomi dan keuangan syariah.

Sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2003, yang berjudul “Kajian Kondisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Perbankan Syariah di

Indonesia” dari seluruh responden penelitian ini (7 bank syariah dan Unit Usaha Syariah) hanya sekitar 10% dari seluruh SDM-nya yang berlatar belakang pendidikan syariah, sedangkan karyawan bank syariah kebanyakan bersumber dari karyawan bank konvensional (70 %), dan sisanya (30 %) berasal dari *fresh graduate* Perguruan Tinggi (20 %), Bank syariah lain (5 %) serta lain-lain (5 %). Selanjutnya dari seluruh jumlah SDM pada bank syariah tersebut didominasi oleh lulusan S-1(59 %) dan lainnya D3 (21 %), SMU (18 %) dan S-2 hanya 2 %. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja yang menguasai ekonomi syariah dimasa depan sangat besar mengingat pertumbuhan lembaga keuangan syariah ini sangat cepat.

Diharapkan sumber daya yang bergabung didalamnya tidak hanya menguasai ilmu ekonomi dan keuangan syariah semata namun juga mampu bersikap *istiqomah* dalam menjalankan bisnis dengan prinsip syariah ini.

#### **Sosialisasi serta Pengelolaan Persepsi Masyarakat**

Dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah dan Murabahah ini persepsi masyarakat adalah faktor yang tidak kalah penting untuk menjadi pertimbangan, Bank Syariah sering dipersepsikan sebagai Baitul Maal yaitu lembaga Sosial untuk membantu pengembangan umat yang implikasinya adalah (Adiwarman, 2000: 9):

Bank syariah tidak boleh : (1) meminta jaminan pembiayaannya. (2) mengenakan denda apabila nasabah tidak membayar tepat waktu (menyita jaminan)

Sebagaimana diakui oleh bank syariah sendiri sosialisasi adalah bagian yang tak kalah penting dalam memasyarakatkan prinsip-prinsip dalam akad syariah yang belum banyak dipahami oleh masyarakat awam, wadah Asbisindo dan peran serta lembaga pendidikan adalah salah suatu sarana yang paling efektif untuk pensosialisasian, karena aset bank syariah yang sebagian besar masih kecil merupakan salah satu kendala tersendiri bagi bank syariah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan permasalahan antara lain

1. Profil pembiayaan (murabahah dan mudharabah) pada bank syariah secara umum adalah :
  - a) Share pembiayaan syariah yang masih kecil dalam perbankan nasional, menjadikan pembiayaan berbasis syariah sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekseternal (inflasi, tingkat bunga bank konvensional )
  - b) Pembiayaan murabahah yang berkoefisien negatif, menunjukkan mudahnya kondisi eksternal dalam model mempengaruhi *mekanisme pembiayaan* ini yang secara statistik menurun jika faktor-faktor (inflasi, tingkat bunga bank konvensional, dana pihak ketiga) tersebut tidak berubah.
  - c) Posisi pembiayaan dalam pasar murabahah sudah mulai mampu diperhitungkan oleh nasabah.
  - d) Permasalahan perundangan adalah masalah yang mendesak dan segera diatasi perkembangan bank syariah.
  - e) Pembiayaan mudharabah yang berkorelasi positif dengan perubahan tingkat suku bunga kredit modal kerja bank konvensional menunjukkan lambatnya pertumbuhan mudhrabah disebabkan faktor-faktor eksternal bank dan faktor internal pada bank tersebut (ketidaksiapan sumber daya manusia, *moral hazard*, nasabah serta mangemen bank yang belum siap dan terbiasa dengan *scheme* yang berdasarkan kepercayaan ini).
2. Peluang pengembangan kegiatan penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor usaha lain yang belum terjangkau akan terbentur pada penerapan prinsip kehati-hatian bank yang telah diterapkan bank syariah terutama untuk pembiayaan

mudharabah disamping adanya faktor Instrumen pasar syariah yang masih terbatas, dan masalah kebijakan serta aturan main yang lebih jelas tertuang dalam undang-undang bank syariah.

3. Prospek kedepan Pembiayaan murabahah bank syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melepaskan diri dari pengaruh perubahan tingkat suku bunga bank konvensional, karena pengaruh yang tinggi ini justru membahayakan masa depan bank syariah sendiri. Serta meningkatkan efisiensi terhadap cost untuk meningkatkan daya saing dengan bank konvensional dalam penentuan nisbah bagi hasil/ keuntungan, meningkatkan sosialisasi kemasyarakat untuk meraih pasar, adalah beberapa saran tindakan yang harus dilakukan Bank Syariah.

### SARAN

1. Segera dibenahinya perundangan syariah karena dinilai merupakan faktor yang bersifat *urgent/* mendesak
2. Perlunya mengkaji dan mencari solusi penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan oleh segenap pihak baik praktisi, akademisi maupun dewan syariah dan pihak yang berkepentingan lainnya. Dibuatnya rambu yang jelas dan standar terhadap teknis pembiayaan.
3. Lembaga pendidikan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang menguasai sistem syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah suatu pengenalan Umum*. Jakarta: Taazkia Institute.
2. Arifin, Zainul. 1999. *Dasar-dasar Manajemen Bank Islam*. Makalah yang disampaikan pada pembekalaan Studi Ekonomi Islam. Surabaya : BMI-Unair.
3. Azis, Amien. 1992. *Mengembangkan Bank Syari'ah di Indonesia*. Buku 2. Cetakan kedua. Jaakarta; Penerbit Bangkit.
4. Chapra, M Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Terjemahan. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
5. Dar, Hum(1Umayon A. dkk. 2001. *Click Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Control Imbalances*. Dalam "IQTISAD". Vol 2 No. 1 Muharram 1422 H/ Maret 2001.
6. FE-UI, 2003. "Kajian Kondisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Perbankan Syariah di Indonesia. Disampaikan dalam Lokakarya Penyusunan Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi se-Indonesia tanggal-28 April 2003. FE-UI.
7. Hamidi, M. Luthfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta, Senayan Abadi Publishing.
8. Karim, Adiwarmn.2003.*Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*.Jakarta: IIIT
9. Mishkin, Frederich S. 1998.*The Economics of Money, Banking, and Financial markets. Fifth edition*. Colombia University.International Student Edition:AWL.
10. Nazir, Mohammad. 1988. *Metodologi penelitian Kualitatif* . Cetakan ke 9 . Bandung. PT. Remaja Rosda karya.
11. Mankiw, Gregory. 1998. *Macroeconomics. Four Edition*.Harvard University.Worth Publisher.
12. Mannan, Abdul. 2000. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Terjemahan.Yogyakarta. Penerbit : Dana Bakti Waqaf.



13. MES, 2003. *Prinsip Syariah dalam Ekonomi*. Jakarta : Masyarakat Ekonomi Syariah.
14. Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta; Intermedia.
15. Siregar, Mulya. 2000. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional: Kontribusi Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional". UNPAD. Bandung: 2003.
16. Sukirno, Sadono. 1998. *Makroekonomi modern*. Jakarta. Penerbit: Rajawali Press
17. Sumartomdjou, Markus dkk. 2003. *Konsumtif Boleh, Produktifpun tersedia*. Dalam : "Kontan" No 25, Tahun VII, 24 Maret 2003.
18. *Mulus Menyalurkan Fulus (Sekilas Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia)*. Dalam : "Kontan" No 25, Tahun VII, 24 Maret 2003.
19. Samuelson, Paul A dan W D Nordaus, 1992. *Ekonomi Mikro*. Edisi Keempat belas .Jakarta;Erlangga.
20. Sumitro, Warkum, 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembagaTerkait, BMI & Takaful Di Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
21. Susilo, Y, dkk, 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

## Lampiran 1

## KUISIONER

Dengan hormat,

Dalam rangka Pengambilan data untuk keperluan penelitian yang berjudul :  
"Analisis Pertumbuhan Produk Pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank syariah di Indonesia maka dimohon bantuannya untuk memberikan jawaban terhadap 9 pertanyaan yang diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sifat wawancara : terbuka

Jumlah pertanyaan 9 buah

1. Bagaimanakah Prosedur pembiayaannya ? cukup mudah/ tidakkah ?
2. Bagaimanakah Pengelolaan Pasca Pembiayaan Mudharabah
3. Bagaimanakah pertumbuhan tren pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank ini ?
4. Kendala-kendala yang berpengaruh pengelolaan pembiayaan, Mudharabah dan Murabahah, adalah sebagai berikut:
  - a) SDM Pegawai bank sendiri
  - b) Penerima pembiayaan (Non Performing Loan)
  - c) Sistem / manajemen pengelolaan pembiayaan tersebut
5. Mengapa Pembiayaan murabahah yang paling banyak dilakukan/ trennya lebih besar dari pada *scheme*, yang lain
6. Peluang di sektor apa yang saat ini sudah dan belum mampu dijangkau oleh instansi melalui skim mudharabah maupun murabaha
7. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan dilakukan ?
8. Kendala/ peluang yang dihadapi oleh bank menyangkut faktor terhadap agama pada pengoperasian bank syariah ini secara keseluruhan
9. Terkait dengan budaya masyarakat setempat dari sisi religi apakah hal ini mempengaruhi dalam : memperluas kantor cabang dan kas pembantu Bank Syariah dari segi perilaku pasar potensial

## Lampiran 2

## Murabahah

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
MRBH	1679059	640034.51901	30
DPK	2077795	768376.99757	30
INFL	11.1393	2.22389	30
SWBI	10.0573	1.89622	30
INVCR	17.5450	.58565	30

## Correlations

		MRBH	DPK	INFL	SWBI	INVCR
Pearson Correlation	MRBH	1.000	.990	-.522	-.291	.739
	DPK	.990	1.000	-.559	-.317	.686
	INFL	-.522	-.559	1.000	.487	.071
	SWBI	-.291	-.317	.487	1.000	-.029
	INVCR	.739	.686	.071	-.029	1.000
Sig. (1-tailed)	MRBH	.	.000	.002	.059	.000
	DPK	.000	.	.001	.044	.000
	INFL	.002	.001	.	.003	.354
	SWBI	.059	.044	.003	.	.439
	INVCR	.000	.000	.354	.439	.
N	MRBH	30	30	30	30	30
	DPK	30	30	30	30	30
	INFL	30	30	30	30	30
	SWBI	30	30	30	30	30
	INVCR	30	30	30	30	30

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	INVCR, SWBI, INFL, DPK <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: MRBH

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 <sup>a</sup>	.989	.988	71390.88753	1.300

a. Predictors: (Constant), INVCR, SWBI, INFL, DPK

b. Dependent Variable: MRBH

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.18E+13	4	2.938E+12	576.469	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.27E+11	25	5096658822		
	Total	1.19E+13	29			

a. Predictors: (Constant), INVCR, SWBI, INFL, DPK

b. Dependent Variable: MRBH

## Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	869320	73783.3		-4.259	.000						
	DPK	.696	.043	.836	16.020	.000	.990	.955	.332	.158	6.3	
	INFL	21236.9	481.432	-.074	-1.850	.076	-.522	-.347	-.038	.270	3.7	
	SWBI	800.791	026.805	.014	.596	.555	-.291	.119	.012	.759	1.3	
	INVCR	87504.4	433.213	.172	3.953	.001	.739	.620	.082	.228	4.3	

a. Dependent Variable: MRBH

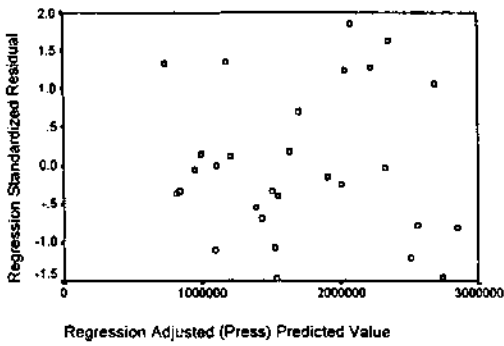
Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	DPK	INFL	SWBI	INVCR
1	1	4.836	1.000	.00	.00	.00	.00	
	2	.135	5.982	.00	.10	.01	.02	
	3	.018	16.269	.00	.00	.11	.96	
	4	.010	21.492	.01	.17	.37	.01	
	5	.000	181.201	.99	.73	.50	.01	1

a. Dependent Variable: MRBH

## Scatterplot

Dependent Variable: MRBH



## AREG

MODEL: MOD\_1

Model Description:

Variable: MRBH  
 Regressors: DPK  
           INFL  
           SWBI  
           INVCR

95.00 percent confidence intervals will be generated.

Split group number: 1 Series length: 30  
 No missing data.

Termination criteria:  
 Parameter epsilon: .001  
 Maximum number of iterations: 10

Initial values:

Estimate of Autocorrelation Coefficient

Rho 0

Cochrane-Orcutt Estimates

Multiple R	.99424941
R-Squared	.98853189
Adjusted R-Squared	.98662054
Standard Error	72616.739
Durbin-Watson	1.3121312

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	4	10908965843745	2727241460936
Residuals	24	126556579296.4	5273190804.0

## Variables in the Equation:

SIG T	B	SEB	BETA	T
DPK .00000000	.68995	.04698	.83034988	14.687333
INFL .07628166	-22815.83946	12315.76862	-.08129784	-1.852571
SWBI .59059237	4473.85468	8204.67616	.01362970	.545281
INVCR .00067266	190424.36171	48786.53180	.17199725	3.903216
CONSTANT .00031517	-2885234.27037	686484.98066	.	-4.202910

## Iteration History:

Iteration	Rho	SE Rho	DW	MSE
1	.32733245	.19287879	1.7639993	4759336086.5
2	.40562504	.18657754	1.8708724	4707301000.3
3	.42849777	.18443491	1.9013762	4701259100.6
4	.43536903	.18376319	1.9104578	4700265531.4
5	.43745237	.18355692	1.9132032	4700039663.8
6	.43808593	.18349395	1.9140373	4699977942.4
7	.43827878	.18347476	1.9142912	4699959800.3
8	.43833750	.18346892	1.9143685	4699954336.3
9	.43835538	.18346714	1.9143920	4699952678.0

Conclusion of estimation phase.

Estimation terminated at iteration number 10 because:

Maximum number of iterations was exceeded.

## FINAL PARAMETERS:

## Estimate of Autocorrelation Coefficient

Rho .43836082  
Standard Error of Rho .18346659

## Cochrane-Orcutt Estimates

Multiple R .9850893  
R-Squared .97040093  
Adjusted R-Squared .96396635  
Standard Error 68556.197  
Durbin-Watson 1.9143992

## Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	4	3544005713425	886001428356.3
Residuals	23	108098899991.9	4699952173.6

## Variables in the Equation:

SIG T	B	SEB	BETA	T
DPK .000000000	.72073	.05628	.87690623	12.805848
INFL .49462425	-9575.88882	13797.83741	-.03843724	-.694014
SWBI .98124040	228.25014	9602.08910	.00089904	.023771
INVCR .01667439	150891.21229	58443.97050	.13519724	2.581810
CONSTANT .01338489	-2361576.17887	881330.80771	.	-2.679557

The following new variables are being created:

Name	Label
FIT_1	Fit for MRBH from AREG, MOD_1
ERR_1	Error for MRBH from AREG, MOD_1
LCL_1	95% LCL for MRBH from AREG, MOD_1
UCL_1	95% UCL for MRBH from AREG, MOD_1
SEP_1	SE of fit for MRBH from AREG, MOD_1

## Mudharabah

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
MDRBH	438937.7	54480.34874	30
DPK	2077795	768376.99757	30
INFL	11.1393	2.22389	30
SWBI	10.0573	1.89622	30
WKCR	18.6450	.61109	30



## Correlations

		MDRBH	DPK	INFL	SWBI	WKCR
Pearson Correlation	MDRBH	1.000	.827	-.624	-.239	-.549
	DPK	.827	1.000	-.559	-.317	-.203
	INFL	-.624	-.559	1.000	.487	.687
	SWBI	-.239	-.317	.487	1.000	.413
	WKCR	-.549	-.203	.687	.413	1.000
Sig. (1-tailed)	MDRBH	.	.000	.000	.101	.001
	DPK	.000	.	.001	.044	.140
	INFL	.000	.001	.	.003	.000
	SWBI	.101	.044	.003	.	.012
	WKCR	.001	.140	.000	.012	.
N	MDRBH	30	30	30	30	30
	DPK	30	30	30	30	30
	INFL	30	30	30	30	30
	SWBI	30	30	30	30	30
	WKCR	30	30	30	30	30

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	WKCR, DPK, SWBI, INFL		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: MDRBH

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 <sup>a</sup>	.874	.854	20808.80409	1.175

a. Predictors: (Constant), WKCR, DPK, SWBI, INFL

b. Dependent Variable: MDRBH

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.52E+10	4	1.881E+10	43.446	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.08E+10	25	433006327.8		
	Total	8.61E+10	29			

a. Predictors: (Constant), WKCR, DPK, SWBI, INFL

b. Dependent Variable: MDRBH

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	132657	46702.3		7.721	.000						
	DPK	.060	.006	.852	9.448	.000	.827	.884	.670	.618	1.61	
	INFL	372.433	1021.746	.138	1.116	.275	-.624	.218	.079	.331	3.02	
	SWBI	459.212	364.075	.190	2.309	.029	-.239	.419	.164	.743	1.34	
	WKCR	48900.5	232.405	-.548	-5.297	.000	-.549	-.727	-.376	.469	2.13	

a. Dependent Variable: MDRBH

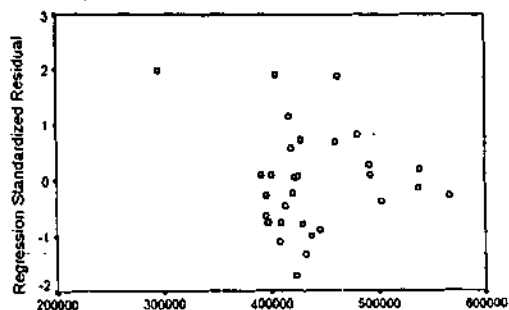
Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	DPK	INFL	SWBI	WKCR
1	1	4.835	1.000	.00	.00	.00	.00	
	2	.136	5.963	.00	.39	.02	.01	
	3	.018	16.276	.00	.01	.13	.96	
	4	.011	21.212	.02	.54	.48	.01	
	5	.000	130.577	.98	.06	.38	.01	

a. Dependent Variable: MDRBH

Scatterplot

Dependent Variable: MDRBH



\* Regression Adjusted (Press) Predicted Value

## AREG

MODEL: MOD\_3

## Model Description:

Variable: MDRBH  
 Regressors: DPK  
           INFL  
           SWBI  
           WKCR

95.00 percent confidence intervals will be generated.

Split group number: 1 Series length: 30  
 No missing data.

## Termination criteria:

Parameter epsilon: .001  
 Maximum number of iterations: 10

## Initial values:

## Estimate of Autocorrelation Coefficient

Rho 0

## Cochrane-Orcutt Estimates

Multiple R .95426566  
 R-Squared .91062295  
 Adjusted R-Squared .89572678  
 Standard Error 17507.829  
 Durbin-Watson 1.2359246

## Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	4	74952892194.9	18738223048.7
Residuals	24	7356577572.5	306524065.5

## Variables in the Equation:

SIG T	B	SEB	BETA	T
DPK .00000000	.07463	.00684	1.0399204	10.911911
INFL .00456821	10143.95913	3242.82757	.4185252	3.128122
SWBI .00208030	7056.81793	2044.96656	.2489344	3.450823
WKCR .00000027	-68224.70595	9661.22976	-.7725836	-7.061700



CONSTANT 1369179.57194 142052.18052 . 9.638568  
 .00000000

## Iteration History:

Iteration	Rho	SE Rho	DW	MSE
1	.12523286	.20251715	1.3749159	308176455.3
2	.15027876	.20180604	1.4044599	307587254.0
3	.15787538	.20156423	1.4134790	307510732.5
4	.16040572	.20148098	1.4164875	307495425.6
5	.16127351	.20145211	1.4175197	307491333.4
6	.16157406	.20144207	1.4178773	307490053.3
7	.16167850	.20143858	1.4180015	307489625.0
8	.16171484	.20143737	1.4180447	307489478.0
9	.16172749	.20143694	1.4180598	307489427.0

Conclusion of estimation phase.

Estimation terminated at iteration number 10 because:

Maximum number of iterations was exceeded.

## FINAL PARAMETERS:

Estimate of Autocorrelation Coefficient

Rho .16173189  
 Standard Error of Rho .2014368

Cochrane-Orcutt Estimates

Multiple R .94003897  
 R-Squared .88367326  
 Adjusted R-Squared .85838484  
 Standard Error 17535.376  
 Durbin-Watson 1.418065

## Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	4	53724226365.3	13431056591.3
Residuals	23	7072256414.8	307489409.3

## Variables in the Equation:

SIG T	B	SEB	BETA	T
DPK .00000000	.07458	.00813	1.0220609	9.1720097
INFL .01472269	9810.15761	3719.71126	.4062133	2.6373438

SWBI	6563.56012	2260.84730	.2394081	2.9031417
.00801302				
WKCR	-64614.16774	11017.37773	-.7371226	-5.8647502
.00000562				
CONSTANT	1310094.61603	161520.03525	.	8.1110347
.00000000				

The following new variables are being created:

Name	Label
FIT_1	Fit for MDRBH from AREG, MOD_3
ERR_1	Error for MDRBH from AREG, MOD_3
LCL_1	95% LCL for MDRBH from AREG, MOD_3
UCL_1	95% UCL for MDRBH from AREG, MOD_3
SEP_1	SE of fit for MDRBH from AREG, MOD_3

#### Correlations

		DPK	INFL	SWBI	INVCR
DPK	Pearson Correlation	1	-.559**	-.317	.686**
	Sig. (2-tailed)	.	.001	.088	.000
	N	30	30	30	30
INFL	Pearson Correlation	-.559**	1	.487**	.071
	Sig. (2-tailed)	.001	.	.006	.708
	N	30	30	30	30
SWBI	Pearson Correlation	-.317	.487**	1	-.029
	Sig. (2-tailed)	.088	.006	.	.877
	N	30	30	30	30
INVCR	Pearson Correlation	.686**	.071	-.029	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.708	.877	.
	N	30	30	30	30

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Correlations

			DPK	INFL	SWBI	INVCR
Spearman's rho	DPK	Correlation Coefficient	1.000	-.445*	-.133	.658**
		Sig. (2-tailed)	.	.014	.482	.000
		N	30	30	30	30
	INFL	Correlation Coefficient	-.445*	1.000	.482**	.117
		Sig. (2-tailed)	.014	.	.007	.539
		N	30	30	30	30
	SWBI	Correlation Coefficient	-.133	.482**	1.000	.183
		Sig. (2-tailed)	.482	.007	.	.333
		N	30	30	30	30
	INVCR	Correlation Coefficient	.658**	.117	.183	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.539	.333	.
		N	30	30	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pembiayaan Musyarakah Nilai (Amount)	Pembiayaan Mudharabah Nilai (Amount)	Piutang Murabahah Nilai (Amount)	DPK	INFLASI	
31739	378604	775721	1028923	9.35	Dec-00
36872	374831	802209	1054741	8.28	Jan-01
35181	378013	860932	1120347	10.51	Feb-01
39887	414414	936046	1215603	10.51	Mar-01
40761	423507	1007600	1284978	10.51	Apr-01
40987	433753	997818	1335826	13.04	May-01
35203	445309	1106592	1442510	13.04	Jun-01
181914	426727	1004157	1440824	13.04	Jul-01
41187	448560	1216366	1528521	12.23	Aug-01
44098	448854	1284013	1500310	13.01	Sep-01
44426	408539	1337022	1712749	13.01	Oct-01
47125	403154	1376331	1728957	13.01	Nov-01
53593	402623	1420401	1806366	12.55	Dec-01
52086	393277	1429806	1813736	14.42	Jan-02
53455	388850	1471915	1811691	15.13	Feb-02
53199	380409	1515827	1840233	14.08	Mar-02
59010	379589	1646874	1929299	13.3	Apr-02
62477	392081	1752568	2011508	12.93	May-02
69415	401255	1891979	2245957	11.48	Jun-02
69327	413254	1981394	2351702	10.05	Jul-02
71635	425804	2135400	2440368	10.6	Aug-02
70116	475236	2230328	2500129	10.48	Sep-02
67155	505683	2316639	2726261	10.33	Oct-02
68021	501243	2492758	2955753	10.48	Nov-02
60191	498681	2324222	2917726	10.03	Dec-02
63166	493439	2404832	3112609	8.74	Jan-03
68221	495662	2491536	3150605	7.34	Feb-03
70395	533795	2607585	3353587	7.12	Mar-03
75422	544017	2783967	3403270	7.82	Apr-02
	558947	2768945	3568765	7.76	